



**SIKAP MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP  
ANCAMAN HUMAN SECURITY TAMBANG SKALA KECIL  
ILEGAL DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO (RDK)**

diajukan untuk melangkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Hubungan Internasional

**SKRIPSI**

Oleh :

**Agung Yudha Wibowo**

**180910101067**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2023**



**SIKAP MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP  
ANCAMAN HUMAN SECURITY TAMBANG SKALA KECIL  
ILEGAL DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO (RDK)**

diajukan untuk melangkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Hubungan Internasional

**SKRIPSI**

Oleh :

**Agung Yudha Wibowo**

**180910101067**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2023**

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Sudarno Sp.d., MM dan Ibu Marwatik yang telah senantiasa memberikan do'a restu dan dukungan untuk kelancaran penyusunan skripsi ini;
2. Saudariku Deni Irmawati, SE., Diana Kartika Sari, Dinar Chandra Ayu, dan Dewi Kusuma Wardhani yang selama ini selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini;
3. Segenap keluarga besar Samuri yang senantiasa memberikan nasehat dan panutan kepada penulis;
4. Almamater Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**MOTTO**

“Man has been endowed with reason, with the power to create, so that he can add to what he’s been given. But up to now he hasn’t been a creator, only a destroyer. Forests keep disappearing, rivers dry up, wildlife’s become extinct, the climate’s ruined and the land grows poorer and uglier every day.” – Anton Chekhov



**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Yudha Wibowo

NIM : 180910101067

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: *Sikap Masyarakat Internasional Terhadap Ancaman Human Security Tambang Skala Kecil Ilegal di Republik Demokratik Kongo (RDK)* adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

Agung Yudha Wibowo

NIM 180910101067

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi berjudul *Sikap Masyarakat Internasional Terhadap Ancaman Human Security Tambang Skala Kecil Ilegal di Republik Demokratik Kongo (RDK)* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 6 November 2023  
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pembimbing	Tanda Tangan
1. Pembimbing Utama Nama : Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si., Ph.D NIP : 196802291998031001	(.....)

2. Pembimbing Anggota Nama : Drs. Djoko Susilo, M.Si., Ph.D NIP : 195908311989021001	(.....)
--	---------

Penguji	Tanda Tangan
1. Penguji Utama Nama : Agus Trihartono, S.Sos., M.A., Ph.D NIP : 196908151995121001	(.....)

2. Penguji Anggota Nama : Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D NIP : 197701052008012013	(.....)
--	---------

**ABSTRAK**

Republik Demokratik Kongo (RDK) merupakan negara di kawasan Afrika yang memiliki cadangan sumber daya alam melimpah. Akan tetapi keuntungan tersebut juga menghadirkan bencana, dimana praktik tambang skala kecil ilegal menjamur. Aktivitas usaha ini diselimuti dengan kekerasan, eksploitasi, kerusakan lingkungan, permasalahan kesehatan hingga konflik. Selama ini RDK telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut namun masih terus gagal. Hal ini kemudian menyulut perhatian internasional terutama pada aspek isu kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap masyarakat internasional terhadap permasalahan kemanusiaan yang muncul sebagai akibat adanya praktik pertambangan skala kecil ilegal di RDK. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat internasional terdiri dari PBB, INGO's dan IGOs mengambil sikap pro-aktif dengan memutuskan untuk ikut terlibat dalam upaya mengatasi isu kemanusiaan yang mengancam *human security* disebabkan oleh praktik tambang skala kecil ilegal di RDK. Ancaman *human security* tersebut berupa *health insecurity*, *environmental security*, dan *personal security*. Melalui pendekatan *people-centered*, *comprehensive*, *context-specific*, and *prevention-oriented approach*, masyarakat internasional membantu untuk memastikan bahwa individu, masyarakat, atau kelompok bebas dalam aspek "*fear, want, and to live dignity*".

Kata kunci: human security, tambang skala kecil ilegal, republik demokratik kongo

**ABSTRACT**

*The Democratic Republic of Congo (DRC) is a country in the African region that has abundant natural resource reserves. However, these profits also brought disaster, where illegal small-scale mining practices mushroomed. This business activity is shrouded in violence, exploitation, environmental damage, health problems, and even conflict. So far, the RDK has tried to overcome this problem but continues to fail. This then sparked international attention, especially on aspects of humanitarian issues. This research aims to analyze the attitude of the international community towards humanitarian problems that arise as a result of illegal small-scale mining practices in the DRC. The research method used in this research is qualitative-descriptive with data collection techniques using literature studies. The results of this research show that the international community consisting of the UN, INGO, and IGO is taking a pro-active stance by deciding to get involved in efforts to overcome humanitarian issues that threaten human security caused by illegal small-scale mining practices in the DRC. These human security threats are in the form of health insecurity, environmental security, and personal security. Through a people-centered, comprehensive, context-specific, and prevention-oriented approach, the international community helps to ensure*

*that individuals, communities, or groups are free from the aspects of "fear, want, and to live dignity".*

*Keywords: human security, illegal small-scale mining, republic democratic of congo*





RINGKASAN

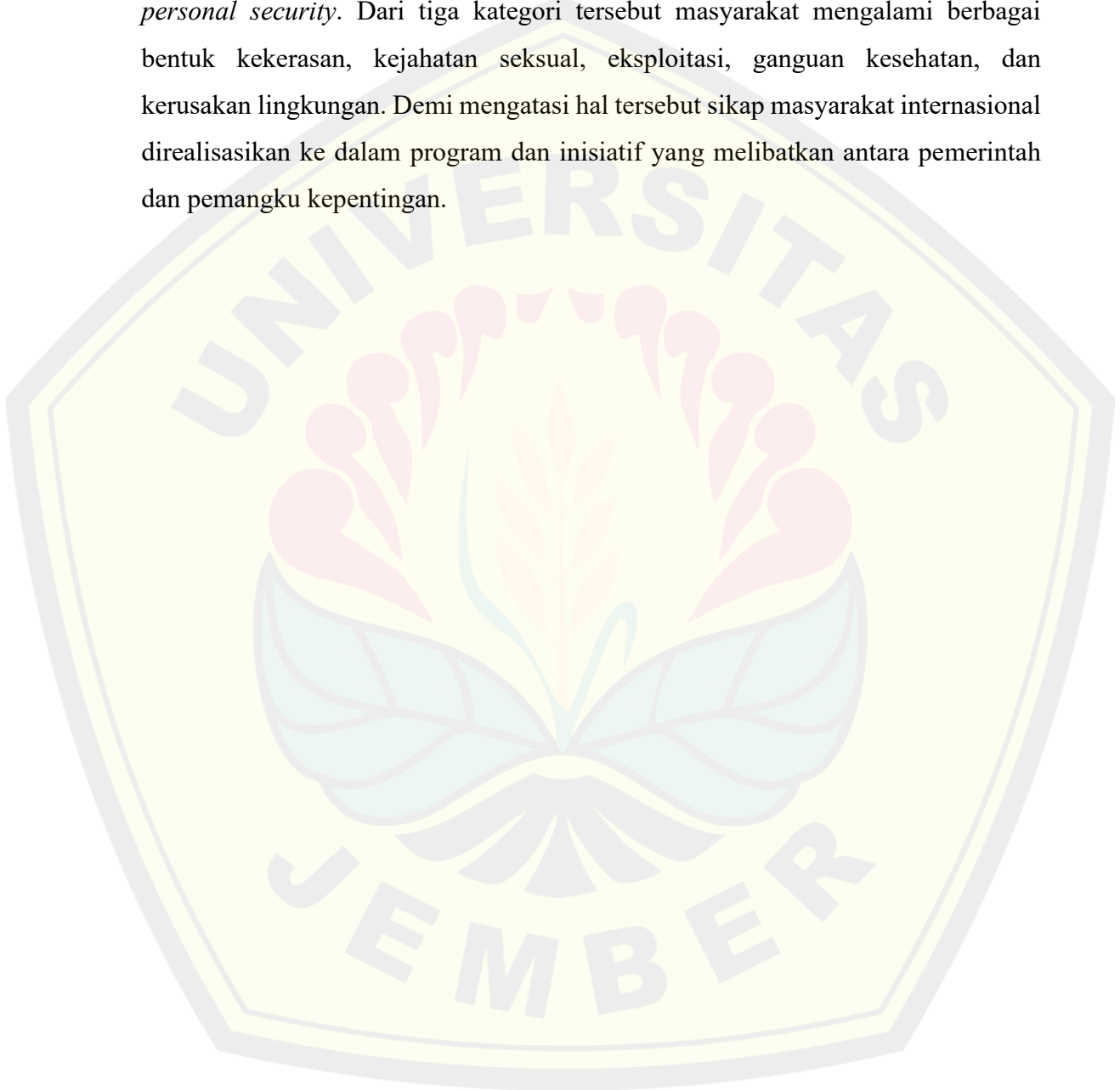
**Sikap Masyarakat Internasional Terhadap Ancaman Human Security Tambang Skala Kecil Ilegal di Republik Demokratik Kongo (RDK);** Agung Yudha Wibowo, 180910101067; 2023; 49 halaman; Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Industri ekstraksi batuan dan mineral bumi yakni pertambangan, merupakan sektor industri yang penting dalam ekonomi global. Republik Demokratik Kongo (RDK) sebagai negara yang memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah mengandalkan sektor industri pertambangan dalam perekonomiannya. Akan tetapi RDK memiliki permasalahan maraknya praktik tambang skala kecil yang beroperasi secara ilegal. Eksistensi dari tambang skala kecil ilegal ini berkembang menjadi masalah kompleks yang melibatkan *human security*. Sebagai negara yang berdaulat RDK berupaya melindungi rakyatnya dengan mengambil upaya memberantas praktik tambang skala kecil ilegal, namun masih belum berhasil hingga saat ini. Kondisi ini kemudian menarik kekhawatiran dan reaksi masyarakat internasional mengenai keamanan terhadap masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap masyarakat internasional terhadap permasalahan kemanusiaan yang muncul sebagai akibat adanya praktik pertambangan skala kecil ilegal di RDK. Teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep dan *Human Security* untuk menjelaskan fenomena yang terjadi serta sikap masyarakat internasional terhadap isu kemanusiaan di RDK. Studi literatur digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data dengan metode kualitatif-deskriptif untuk menganalisis data yang telah diperoleh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sesuai dengan konsepsi *Human Security*, masyarakat internasional yang terdiri dari PBB, INGO's (*International Non-government Organization*), dan IGO (*International Government Organization*) mengambil sikap pro-aktif. Sikap tersebut dilakukan menganut pada lima pendekatan *people-centred*, *comprehensive*, *context-specific*, *prevention*

*oriented*, serta *protection and empowerment*. PBB, PACT, dan USAID menjadi salah satu dari sekian banyak entitas internasional yang berperan aktif dalam upaya memitigasi ancaman terhadap *human security* yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan skala kecil ilegal di RDK. Sesuai konsep *human security* dapat dikategorikan terdapat ancaman *health security*, *environmental security*, dan *personal security*. Dari tiga kategori tersebut masyarakat mengalami berbagai bentuk kekerasan, kejahatan seksual, eksploitasi, gangguan kesehatan, dan kerusakan lingkungan. Demi mengatasi hal tersebut sikap masyarakat internasional direalisasikan ke dalam program dan inisiatif yang melibatkan antara pemerintah dan pemangku kepentingan.



## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Sikap Masyarakat Internasional Terhadap Ancaman Human Security Tambang Skala Kecil Ilegal di Republik Demokratik Kongo (RDK)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi penulis juga mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si., Ph.D dan Drs. Djoko Susilo, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak sekali kontribusi dan meluangkan waktunya untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Dra. Sri Yuniati, M.Si selaku dosen Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sekaligus sekretaris Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Tim Penguji yang telah memberikan banyak kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini baik saat sidang skripsi maupun saat revisi skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca.

Jember,  
Penulis,

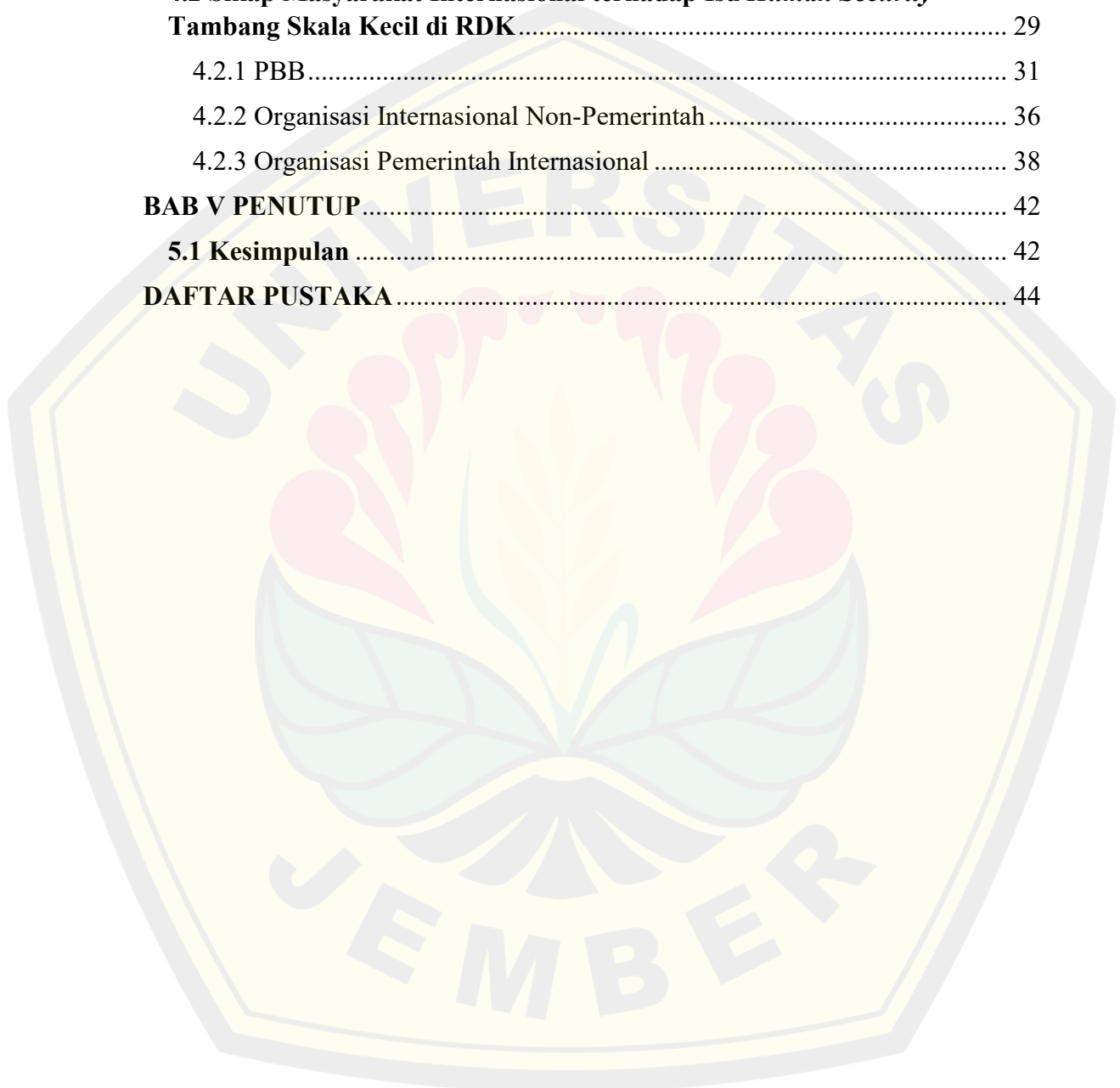
Agung Yudha Wibowo

NIM 180910101067

**DAFTAR ISI**

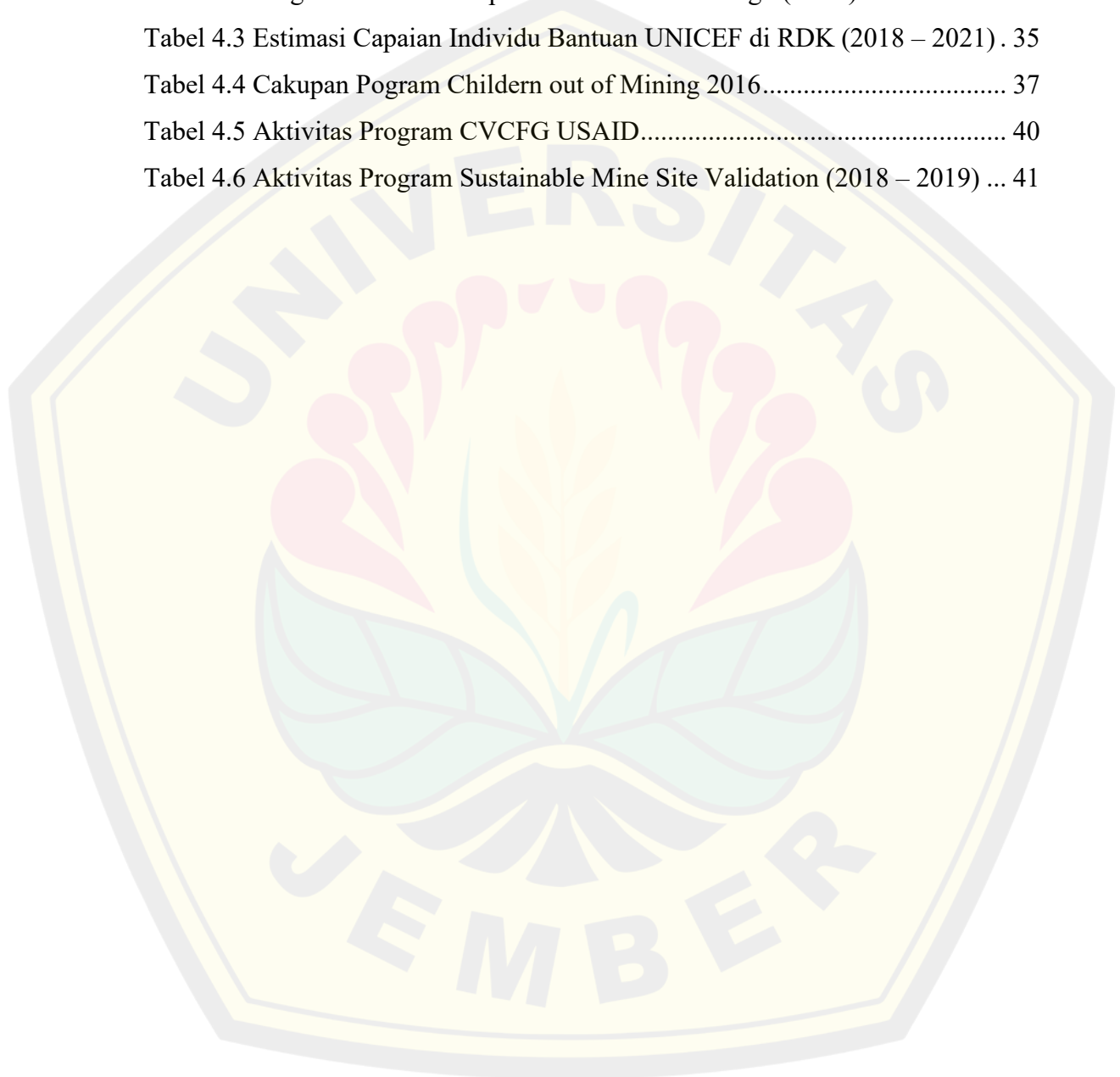
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	viii
<b>PRAKATA</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN</b> .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	4
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	4
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	5
<b>2.1 Kerangka Konseptual</b> .....	5
2.1.1 Human Security .....	5
<b>2.2 Kerangka Pemikiran Operasional Penelitian</b> .....	9
<b>2.3 Tinjauan Studi Terdahulu</b> .....	10
<b>2.4 Ringkasan Penerapan Teori</b> .....	13
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b> .....	13
<b>3.1 Pendekatan Penelitian</b> .....	13
<b>3.2 Objek dan Fokus Penelitian</b> .....	13
<b>3.4 Keabsahan Data</b> .....	14
<b>3.5 Teknik Analisis Data</b> .....	15
<b>BAB 4 KEGAGALAN REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO MENGATASI TAMBANG SKALA KECIL ILEGAL SERTA SIKAP MASYARAKAT INTERNASIONAL</b> .....	16

<b>4.1 Kegagalan Pemerintah RDK dalam Mengatasi Ancaman <i>Human Security</i></b> .....	16
4.1.1 <i>Health Insecurity</i> .....	20
4.1.2 <i>Environmental Insecurity</i> .....	21
4.1.3 <i>Personal Insecurity</i> .....	24
<b>4.2 Sikap Masyarakat Internasional terhadap Isu <i>Human Security</i> Tambang Skala Kecil di RDK</b> .....	29
4.2.1 PBB.....	31
4.2.2 Organisasi Internasional Non-Pemerintah.....	36
4.2.3 Organisasi Pemerintah Internasional .....	38
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	42
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	44



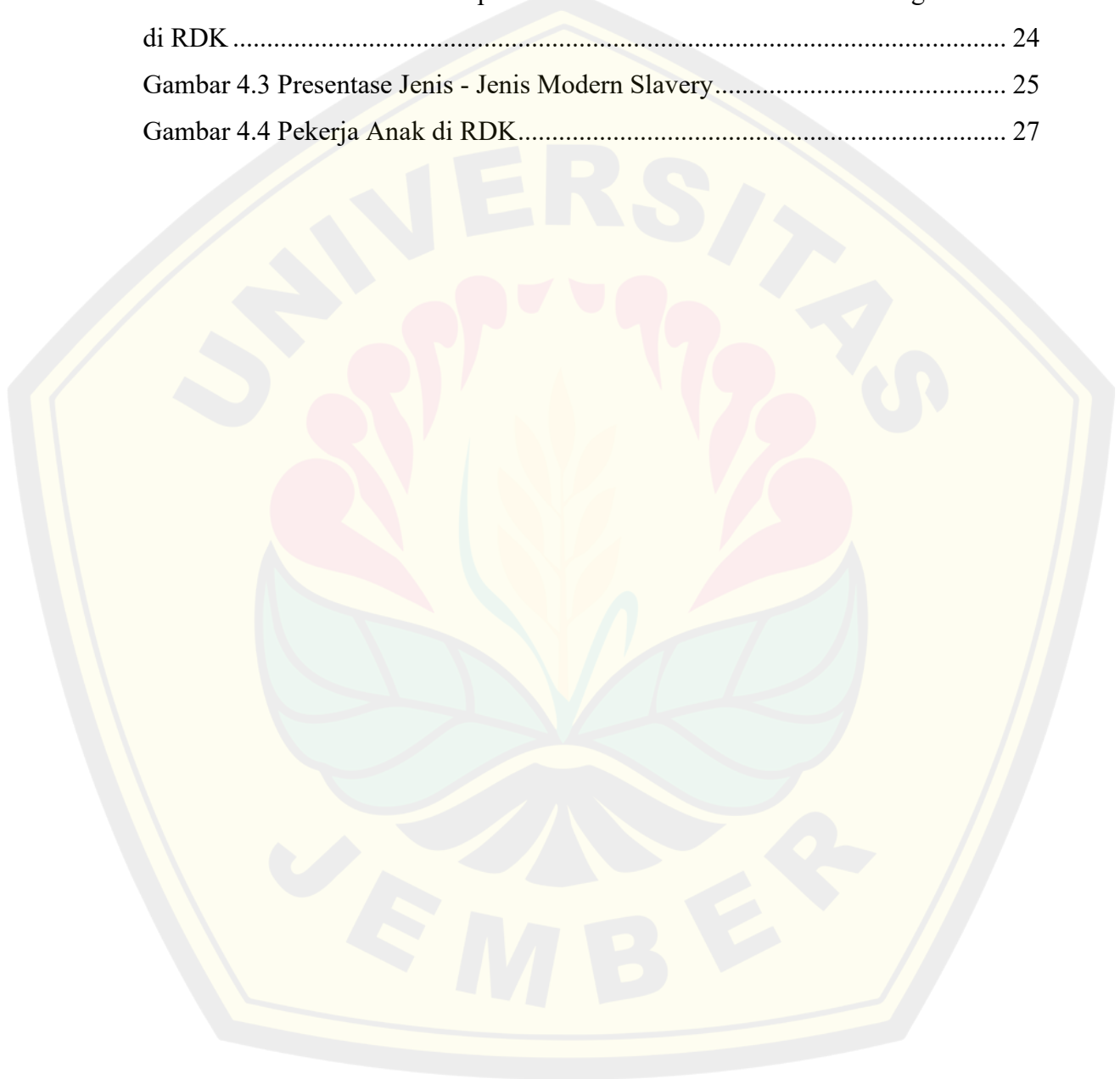
**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Konvensi Internasional Berkaitan Aktivitas Pertambangan .....	2
Tabel 4.1 Outcome Draft Country Programme for Democratic Republic of the Congo (2020-2024) .....	32
Tabel 4.2 Program UNEP di Republik Demokratik Kongo (RDK) .....	34
Tabel 4.3 Estimasi Capaian Individu Bantuan UNICEF di RDK (2018 – 2021) .	35
Tabel 4.4 Cakupan Pogram Childern out of Mining 2016.....	37
Tabel 4.5 Aktivitas Program CVCFG USAID.....	40
Tabel 4.6 Aktivitas Program Sustainable Mine Site Validation (2018 – 2019) ...	41



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Operasional Penelitian.....	9
Gambar 2.2 Bagan Ringkasan Penerapan Teori .....	13
Gambar 4.1 Kondisi Hutan di RDK.....	22
Gambar 4.2 Persebaran Kelompok FARDC di Seluruh Lokasi Tambang Mineral di RDK .....	24
Gambar 4.3 Presentase Jenis - Jenis Modern Slavery.....	25
Gambar 4.4 Pekerja Anak di RDK.....	27



**DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN**

<b>Singkatan/Istilah</b>	<b>Arti dan Keterangan</b>
<b>CASE</b>	Centre Africaine pour la Santé et l'Environnement (Pusat Kesehatan dan Lingkungan Afrika)
<b>CLS</b>	Community Learning Sites (Situs Pembelajaran Komunitas)
<b>CVCFG</b>	The Commercially Viable Conflict-Free Gold Project (Proyek Emas Bebas Konflik yang Layak Secara Komersial)
<b>FARDC</b>	Armed Forces of the Democratic Republic of Congo (Angkatan Bersenjata Republik Demokratik Kongo)
<b>FTS</b>	Free The Slaves (Bebaskan Para Budak)
<b>GEF</b>	Global Environment Facility (Fasilitas Lingkungan Global)
<b>ICC</b>	International Criminal Court (Pengadilan Pidana Internasional)
<b>IGO</b>	International Government Organization (Organisasi Pemerintah Internasional)
<b>ILO</b>	International Labour Organization (Organisasi Buruh Internasional)
<b>INGO</b>	International Non-Government Organization (Organisasi non-Pemerintah Internasional)
<b>IPIS</b>	International Peace Information Services (Layanan Informasi Perdamaian Internasional)
<b>ITA</b>	International Trade Administration (Administrasi Perdagangan Internasional)
<b>iTSCi</b>	Tin Supply Chain Initiative (Inisiatif Rantai Pasokan Timah)
<b>LSM</b>	Lembaga Swadaya Masyarakat
<b>M2M</b>	Mines to Market (Proyek Tambang ke Pasar)
<b>MCK</b>	Mandi, Cuci, Kakus
<b>PBB</b>	Perserikatan Bangsa – Bangsa
<b>Q&amp;V</b>	Mine Site Qualification and Validation (Klarifikasi dan Validasi Lokasi Tambang)
<b>RDK</b>	Republik Demokratik Kongo
<b>SAESSCAM</b>	Service for Assistance and Organisation of Artisanal and Small-Scale Mining (Pelayanan Pendampingan dan Penyelenggaraan Pertambangan Rakyat dan Skala Kecil)
<b>SGBV</b>	Sexual and Gender-Based Violence (Kekerasan Seksual Berbasis Gender)
<b>TBC</b>	Tuberkulosis



<b>UNEP</b>	United Nations Environment Programme (Program Lingkungan Perserikatan Bangsa – Bangsa)
<b>UNDP</b>	United Nations Development Program (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa – Bangsa)
<b>UNICEF</b>	United Nations Children's Fund (Dana Anak Perserikatan Bangsa – Bangsa)
<b>UNTFHS</b>	United Nations Trust Fund for Human Security (Dana Perwalian Perserikatan Bangsa – Bangsa untuk Keamanan Manusia)
<b>USAID</b>	United States Agency for International Development (Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat)
<b>WASH</b>	Water, Sanitation, and Hygiene (Air, Sanitasi, dan Kebersihan)
<b>WHO</b>	World Health Organization (Organisasi Kesehatan Dunia)
<b>WIM</b>	The Watoto Injeya Mungoti (Proyek Anak – Anak Bebas dari Pertambangan)

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pertambangan merupakan bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan untuk mengekstrak sumber daya alam mineral dan batuan dari dalam bumi, baik dilakukan secara mekanis menggunakan mesin – mesin industri ataupun secara manual (Sukandarrumidi, 2016). Produk hasil dari pertambangan dapat dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan oleh berbagai entitas. Usaha pertambangan dapat dilakukan oleh individu/kelompok, badan hukum, ataupun badan usaha. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum pertambangan merupakan jenis kegiatan yang dilakukan untuk mengekstraksi sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi maupun praktis bagi kehidupan manusia.

Meskipun aktivitas pertambangan memberikan manfaat yang besar bagi manusia dalam operasionalnya sering kali dikaitkan dengan konsekuensi negatif yang terjadi terhadap lingkungan dan manusia. Sebuah aktivitas ekonomi harusnya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan serta keberlangsungan lingkungan sekitarnya. Negara sebagai aktor domestik berperan penting dalam mengatur kegiatan ini, melalui kerangka kerja dan kebijakan nasional. Kemudian dalam level internasional, juga terdapat komitmen serta konvensi berkaitan dengan lingkungan hingga hak asasi manusia yang berkaitan dengan aktivitas di dalam usaha pertambangan. Namun, masih banyak negara yang belum berhasil mengatasi permasalahan yang menyelubungi praktik pertambangan, diantaranya adalah Republik Demokratik Kongo (RDK).

Republik Demokratik Kongo (RDK) merupakan negara di kawasan Afrika yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, dan dikenal sebagai salah satu pemasok hasil mineral terbesar global seperti Kobalt. Menurut U.S. ITA (*International Trade Administration*) (2022), pada tahun 2020, RDK memproduksi

95.000 ton setara 41% pasokan kobalt global. Hal ini menjadikan usaha pertambangan berkontribusi besar bagi ekonomi negara. Tidak terkecuali RDK juga merupakan salah satu negara yang menjadi bagian dari beberapa konvensi internasional yang didalamnya berkaitan dengan operasional aktivitas pertambangan seperti,

Tabel 1.1 Konvensi Internasional Berkaitan Aktivitas Pertambangan

No.	Konvensi	Ratifikasi
1	Stockholm Convention on Persistent Organic Pollution (2001)	✓
2	Minamata Convention on Mercury (2013)	✓
3	African Convention on The Conservation of Nature and Natural Resources (2003)	✓
4	ILO C. 138, Minimum Age	✓
5	ILO C. 182, Worst Form of Child Labor	✓
6	UN CRC	✓
7	UN CRC Optional Protocol on Armed Conflict	✓

Sejalan dengan konvensi – konvensi internasional tersebut, RDK mengadopsinya ke dalam beberapa peraturan terkait dengan praktik usaha pertambangan. Diantara peraturan – peraturan tersebut yakni, *Mining Code* (2002) dan amandemennya *Mining Code* (2018), serta *Mining Regulation* (2003). Hal tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam lingkup peraturan perundang – undangan untuk mengontrol operasi pertambangan di dalam negeri agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik. RDK juga melakukan upaya formalisasi tambang – tambang skala kecil dengan tujuan untuk mengatasi maraknya praktik pertambangan ilegal. Proses formalisasi tersebut dilakukan oleh lembaga pemerintah SAESSCAM yang dibentuk pada tahun 2003 dengan tugas melakukan pendekatan serta pendampingan aktor – aktor pertambangan skala kecil, dan pendataan terkait aktivitas pertambangan di RDK. Pemerintah juga sempat memberlakukan pelarangan aktivitas pertambangan pada September 2010 melalui Peraturan Presiden, yang

kemudian dicabut pada Maret 2011. Tidak hanya itu pemerintah juga menerjunkan sejumlah aparat kepolisian dan tentara untuk mengatasi praktik pertambangan ilegal.

Kendati demikian, nampaknya upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tambang skala kecil masih belum berhasil. Kebijakan yang diberlakukan pemerintah seperti Peraturan Presiden yang memberlakukan pelarangan aktivitas pertambangan, justru memicu para penambang untuk terpaksa melakukan aktivitas pertambangan ilegal untuk tetap bekerja (Pein, 2022). Menurut data pemetaan pertambangan skala kecil dan artisanal oleh IPIS (2021), di RDK tahun 2009 hingga 2021 tercatat terdapat 2.629 lokasi pertambangan dengan jumlah pekerja sekitar 379.000 orang. Akan tetapi, banyak dari para penambang tersebut tidak memiliki ijin atau mematuhi prosedur sesuai aturan pemerintah. Berdasarkan laporan dari lembaga yang sama sekitar 200.000 orang bekerja secara ilegal di tambang tersebut. Lebih parahnya, dari jumlah total 2.629 lokasi pertambangan, 1.013 diantaranya ditemukan bahwa terdapat kelompok – kelompok bersenjata yang terlibat dalam praktik pertambangan. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa selama ini upaya pemerintah RDK dalam memberantas praktik pertambangan skala kecil ilegal masih belum berhasil.

Kondisi tersebut memicu indikasi dimana praktik pertambangan di RDK terutama pada sektor pertambangan skala kecil, menimbulkan permasalahan terkait *human security*. Dalam operasionalnya aktivitas pertambangan skala kecil tersebut melibatkan individu dari segala usia, bahkan termasuk anak – anak, yang harus berkerja dalam kondisi lingkungan yang keras. Diperkirakan sekitar 40.000 anak berkerja sebagai penambang di tambang kobalt skala kecil di RDK (Melville, 2020). Selain pekerja anak, juga terdapat praktik kekerasan seksual terhadap perempuan dimana, mereka yang tinggal di dekat area pertambangan lebih rentan mengalami tindak kekerasan seksual baik dilakukan oleh orang lain ataupun pasangannya (Nordas R., dkk., 2016). Masyarakat RDK juga ditemukan banyak yang menderita penyakit seperti cacat lahir, asma, dan diare (Unreported World, 2021). RDK menduduki posisi tertinggi di kawasan pada tingkat cacat lahir pada

anak di angka 71 dari 1000 anak (Children's National, n.d.). Di Kinshasa melalui sebuah studi kesehatan ditemukan bahwa mayoritas sampel yang dikumpulkan dari 216 orang 56% menderita asma (Kabengele, dkk., 2019). Kemudian, dalam kasus diare, diperkirakan sebanyak lebih dari 1.45 juta orang menderita penyakit tersebut di tahun 2019 (Mbaka, dkk., 2022).

Adanya ancaman *human security* yang terjadi di suatu negara sering kali memicu sikap masyarakat internasional utamanya aktor non-negara sebagai sebuah aksi kemanusiaan untuk membantu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman tersebut. Terlebih ancaman *human security* menjadi salah satu akar penyebab sebelum terjadinya konflik yang mengarah pada lingkup kejahatan kemanusiaan. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk menganalisis sikap masyarakat internasional melihat masih belum berhasilnya upaya Republik Demokratik Kongo (RDK) dalam mengatasi pertambangan skala kecil ilegal sehingga memunculkan ancaman terhadap *human security*.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana sikap masyarakat internasional terhadap ancaman *human security* sebagai akibat aktivitas pertambangan skala kecil ilegal di Republik Demokratik Kongo (RDK)?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap masyarakat internasional terhadap permasalahan kemanusiaan yang muncul sebagai akibat adanya praktik pertambangan skala kecil ilegal di Republik Demokratik Kongo (RDK).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi publik terutama dalam isu *human security* dan politik internasional. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pembanding dalam penelitian sejenis, atau bahkan menjadi bahan awal untuk penelitian – penelitian yang lainnya.

## BAB 2

## TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Kerangka Konseptual

## 2.1.1 Human Security

Konsep *human security* berdasarkan *United Nations Development Programme* (UNDP, 1994) mendefinisikan keamanan manusia sebagai keamanan yang mencakup keselamatan seseorang dari ancaman kronis seperti ekonomi, kelaparan, penyakit, lingkungan dan tindakan represif sehingga individu harus mendapatkan perlindungan dari berbagai gangguan yang membahayakan kehidupan mereka sehari – hari, serta berdampak terhadap keberadaan masyarakat yang luas. Kemudian, lebih lanjut *United Nations Trust Fund for Human Security* (UNTFHS, 2016) dalam *Human Security Handbook* menjelaskan bahwa *human security* mencakup hak seseorang untuk hidup dalam kebebasan dan martabat, serta bebas dari kemiskinan dan keputusasaan,

*“The right of people to live in freedom and dignity, free from poverty and despair. All individuals, in particular vulnerable people, are entitled to freedom from fear and freedom from want, with an equal opportunity to enjoy all their rights and fully develop their human potential”* (2016, hal. 6).

Didalam konsep *human security* terdapat tujuh dimensi keamanan, dimana masing – masingnya memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Apabila terjadi salah satu ketidakamanan, maka dampaknya akan dapat berpengaruh terhadap kategori lainnya. Tujuh dimensi keamanan manusia menurut UNTFHS (2016) adalah:

1. *Economic Security* (Keamanan Ekonomi), mengacu pada kapabilitas seseorang untuk memenuhi kebutuhan mereka secara konsisten (stabil). Ketidakamanan dapat berasal dari kemiskinan secara terus menerus, penangguran, kurangnya akses terhadap kredit, gaji rendah, dan peluang ekonomi lainnya.

2. *Food Security* (Keamanan Pangan), merupakan jaminan keamanan terhadap akses ke nutrisi dasar (pokok) dan pasokan makanan sehingga terhindar dari ancaman seperti, kelaparan dan kenaikan harga pangan.
3. *Health Security* (Keamanan Kesehatan), mengacu pada jaminan keamanan terhadap masalah kesehatan seperti epidemi, malnutrisi, sanitasi buruk, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan mendasar.
4. *Environmental Security* (Keamanan Lingkungan), merupakan kategori keamanan yang berarti bahwa setiap orang harusnya terbebas dari ancaman yang ditimbulkan oleh degradasi lingkungan, bencana alam, polusi hingga penipisan sumber daya yang terjadi di sekitarnya. Kondisi tersebut dapat berasal dari faktor alamiah maupun buatan (aktivitas manusia).
5. *Personal Security* (Keamanan Personal), merupakan keamanan personal yang bermaksud untuk melindungi seseorang dari bentuk kekerasan fisik, baik yang berasal dari domestik maupun eksternal. Ketidakamanan personal dapat berasal dari segala bentuk kekerasan fisik, tindak kejahatan perdagangan manusia, hingga tenaga kerja anak (*child labour*).
6. *Community Security* (Keamanan Komunitas), mengacu pada keamanan identitas, kelompok, golongan atau komunitas masyarakat dari ancaman seperti kejahatan, terorisme, ketegangan antar etnis, agama, dan identitas lainnya.
7. *Political Security* (Keamanan Politik), mengacu pada perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan semua orang dari ancaman – ancaman seperti represi politik, pelanggaran hak asasi manusia, serta kurangnya supermasi hukum dan keadilan.

Pada penelitian ini nantinya peneliti tidak akan menganalisis seluruh tujuh kategori keamanan dalam konsep *human security*. Akan tetapi peneliti akan lebih berfokus pada *health security*, *environmental security*, dan *personal security*.

Perubahan ancaman terjadi seiring dengan munculnya keberagaman yang menyelimuti sebagian besar aspek pada tiap – tiap manusia. Sebelum era Perang Dingin, konteks ancaman yang nampak mengambil bentuk sebagai agresi militer,

konflik, serta kepemimpinan oligarki dan tirani. Akan tetapi pada abad ke 20-an hingga era saat ini, ancaman – ancaman tersebut berkembang begitu banyaknya. Sebut saja, tindak kekerasan terhadap individu, terorisme, kekerasan seksual, kemiskinan, kesehatan, perpindahan manusia secara terpaksa, dan masih banyak lainnya.

Pergeseran bentuk ancaman – ancaman tersebut memiliki pola yang beragam. Pada masa terdahulu, sebuah ancaman meliputi entitas negara dan banyak berkaitan dengan militer. Di era abad ini, ancaman tersebut bisa sangat dekat dan dapat dengan mudah ditemukan, karena polanya telah berganti dari keamanan *state-centric* ke sebuah keamanan individu, baik dari aspek perlingungannya maupun pemberdayaannya.

*Human security* berfungsi sebagai pelindung kebebasan ataupun pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Hal yang pada dasarnya melekat pada tiap individu. Bagaimana kebebasan dan pemenuhan tersebut diwujudkan mungkin mengalami perubahan. Akan tetapi, tujuan utamanya ditujukan untuk melindungi hak asasi yang semestinya diperjuangkan. *Human security* juga dilihat sebagai sebuah jalan yang mampu memberikan kekuatan dan aspirasi terhadap umat manusia.

Didalam *human security* terdapat lima pendekatan fundamental yang membedakannya dari sekedar “berkeja sama” (UNTFHS, 2016). Pendekatan tersebut merupakan:

- a. *People-centred*
- b. *Comprehensive*
- c. *Context-specific*
- d. *Prevention-oriented*
- e. *Protection and empowerment*

Pada dasarnya pendekatan *human security* berkisar pada sosok individu (*people-centred*). Hal ini mempertimbangkan berbagai faktor yang mampu membahayakan



keberlangsungan hidup, kesejahteraan, serta martabat masyarakat dan komunitasnya, dengan fokus khusus terhadap kelompok yang paling rentan.

Selain itu, pendekatan *human security* mengakui sifat rumit dan saling keterkaitan dari hambatan – hambatan yang dihadapi oleh seorang individu dalam upayanya mencapai “*freedom from want, fear and dignity*”. Melalui pendekatan *comprehensive* serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam mengatasi tantangan, penerapan *human security* yang menjamin koherensi, mengeliminasi duplikasi dan memajukan solusi terintegrasi menghasilkan perbaikan yang efektif juga nyata dalam kehidupan masyarakat sehari – hari. Kolaborasi masyarakat internasional menjadi sangat penting dalam menerapkan pendekatan ini terhadap *human security*. Berbagai aktor internasional termasuk negara atau pemerintah, organisasi internasional pemerintah, organisasi internasional non-pemerintah, organisasi regional, dan sektor swasta, memainkan peranan penting dalam upaya mengatasi tantangan terkait keamanan manusia. Kolaborasi yang efektif di antara para aktor internasional ini memerlukan komitmen terhadap tujuan bersama, komunikasi terbuka, dan upaya terkoordinasi untuk mengatasi tantangan *human security* yang saling berhubungan. Penting untuk mengakui adanya saling ketergantungan antar aktor dan pentingnya tindakan kolektif dalam menciptakan dunia yang lebih aman dan berkelanjutan bagi seluruh manusia.

Selanjutnya, saat mencari solusi dari sebuah ancaman, tidak menutup kemungkinan adanya berbagai macam konteks dari berbagai latar belakang yang membutuhkan pendekatan *context-specific*. Konteks tersebut mencakup aspek perbedaan kapasitas masyarakat, komunitas, dan pemerintah serta akar penyebab. Untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan perbedaan ancaman yang ada, dibutuhkan analisis mengenai situasi yang dialami, sehingga bisa muncul solusi yang spesifik pula. Hasil dari analisis tersebut yang kemudian dikembangkan untuk mencari solusi sesuai dengan realitas atau lingkungannya sehingga dapat diterima.

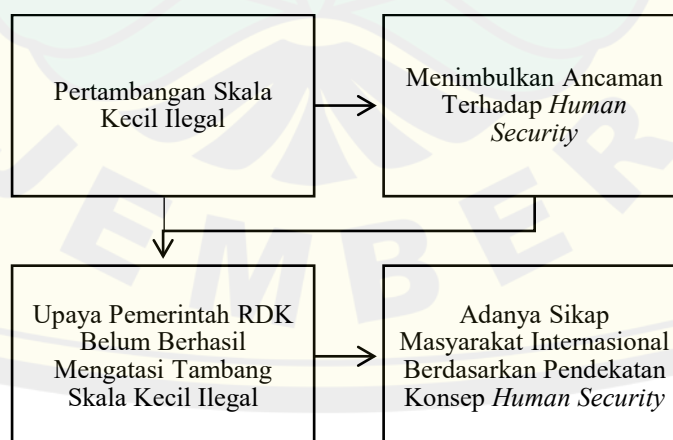
Kemudian, pendekatan *human security* lebih dari sekedar reaksi langsung dan memprioritaskan pencegahan (*prevention-oriented*). Melalui proses

pemeriksaan menyeluruh terhadap akar penyebab tantangan dan penetapan solusi yang kuat dan berkelanjutan, *human security* mendorong terciptanya sebuah sistem “peringatan dini”. Mekanisme atau sistem ini ditujukan untuk membantu memitigasi dampak ancaman yang ada dan, apabila memungkinkan, mencegah munculnya tantangan di masa depan.

Lebih lanjut, pendekatan *human security* mengakui tugas intrinsik dalam setiap masyarakat. Merupakan hal penting untuk memberdayakan individu dan komunitas untuk mampu mengekspresikan serta memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan orang lain. Demikian pula, aspek mendasar dari pendekatan *human security* mencakup norma, proses, dan institusi yang bersifat *top-down*, seperti penerapan sistem peringatan dini, tata kelola yang baik, supermasi hukum, dan mekanisme perlindungan sosial. Elemen – elemen ini (*protection and empowerment*) mengintegrasikan langkah – langkah ke dalam kerangka kerja yang lebih siap untuk menangani tantangan rumit yang mempengaruhi kondisi manusia.

Lima prinsip tersebut membentuk pendekatan *human security* yang saling menguatkan. *Human security* mencakup pengakuan terhadap kekuatan yang diperoleh dari kemitraan sejati, dimana berbagai entitas dapat menggabungkan kekuatan mereka untuk mencapai sinergi menghasilkan dampak yang jauh lebih besar dalam mengatasi tantangan yang bersifat kompleks dan multidimensi saat ini.

## 2.2 Kerangka Pemikiran Operasional Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Operasional Penelitian

Kerangka pemikiran yang digambarkan diatas, merupakan dasar pemikiran daripada penelitian ini. Berawal dari adanya aktivitas ilegal pertambangan skala kecil di Republik Demokratik Kongo (RDK), pemerintah berupaya untuk mengatasi hal tersebut namun masih belum berhasil. Kondisi tersebut kemudian menyisakan ancaman – ancaman terhadap *human security* yang mempengaruhi masyarakat. Ancaman tersebut meliputi kategori *health*, *environmental*, dan *personal insecurity*. Ketidakberhasilan pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab melindungi rakyatnya, mendorong sikap masyarakat internasional berdasarkan pendekatan penanganan ketidakamanan dalam konsep *human security*.

### 2.3 Tinjauan Studi Terdahulu

Peneliti melakukan tinjauan terhadap studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Langkah ini digunakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan studi – studi terdahulu yang sudah ada. Dalam hal ini, peneliti melakukan tinjauan terhadap dua studi terdahulu. Studi terdahulu pertama yang ditinjau oleh peneliti adalah tulisan Mirjam A. F. Ros-Tonen, Jane J. Aggrey, Dorcas Peggy Somuah, dan Mercy Derkyi yang dipublikasikan dalam jurnal ELSEVIER: *The Extractive Industries and Society* pada tahun 2021, dengan judul '*Human Insecurities in Gold Mining: A Systematic Review of Evidence from Ghana*'. Penelitian ini menjelaskan bahwa aktivitas pertambangan informal yang umumnya beroperasi secara ilegal berdampak merugikan, terutama penyebaran dan konsekuensi dari aktivitas tersebut menjadi kekhawatiran yang berkembang di kawasan sub-Sahara Afrika. Ia juga mengidentifikasi bahwa wacana sekuritisasi sering digunakan untuk membenarkan pendekatan militer terhadap praktik pertambangan ilegal, tetapi gagal untuk melihat berbagai dimensi ketidakamanan yang timbul dari pertambangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan keamanan manusia untuk mengungkap ketidakamanan yang timbul dari aktivitas pertambangan emas di Ghana berdasarkan tinjauan literatur sistematis dari studi empiris mengenai dampak pertambangan di berbagai disiplin ilmu. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pertambangan emas di Ghana menimbulkan ketidakamanan manusia di dimensi ketidakamanan lingkungan dan kesehatan, sementara dimensi keamanan ekonomi, pangan,

komunitas, personal, dan politik sedikit ditemukan. Oleh karena penulis juga merekomendasikan respon pemerintah dilakukan dengan pendekatan multidimensi dan terintegrasi.

Terdapat persamaan juga perbedaan antara studi terdahulu oleh Mirjam A. F. Ros-Tonen, Jane J. Aggrey, Dorcas Peggy Somuah, dan Mercy Derkyi dengan penelitian ini. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah ruang lingkup pembahasan dari kedua penelitian sama yakni ancaman keamanan manusia di pertambangan skala kecil ilegal. Sementara perbedaannya, terdapat pada lokasi dan fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Aggrey, dkk. berfokus pada mengidentifikasi ancaman keamanan manusia dari aktivitas pertambangan skala kecil ilegal di Ghana serta merekomendasikan pendekatan pemerintah dalam merespon permasalahan tersebut. Pada penelitian ini, peneliti fokus mengidentifikasi ancaman keamanan manusia dari aktivitas pertambangan skala kecil ilegal di Republik Demokratik Kongo (RDK) serta melihat sikap internasional terhadap permasalahan tersebut.

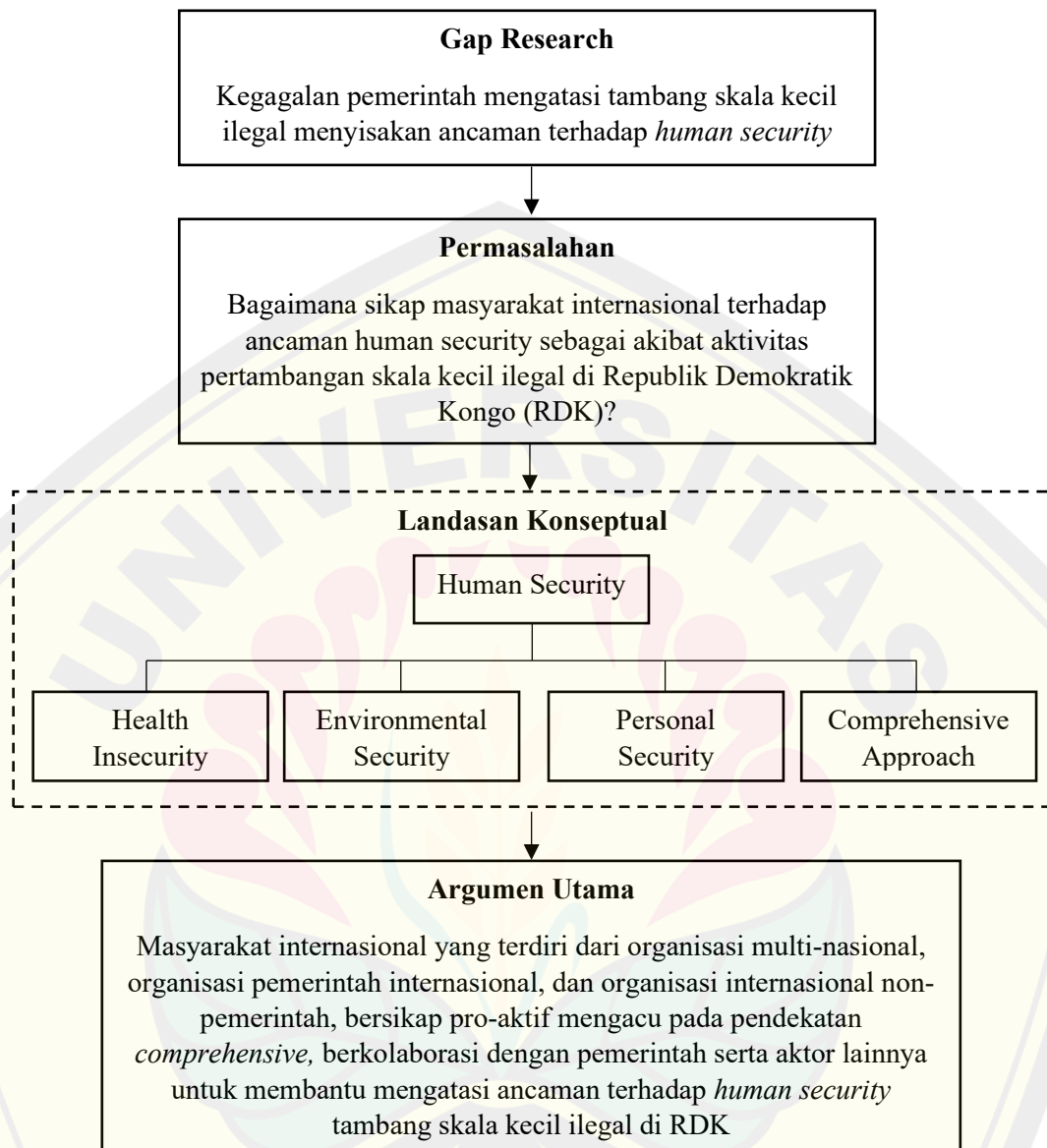
Studi terdahulu kedua yang ditinjau oleh peneliti merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Sara Geenen dengan judul '*A Dangerous Bet: The Challenges of Formalizing Artisanal Mining in The Democratic Republic of Congo*', dipublikasikan dalam jurnal *Resources Policy* tahun 2012. Penelitian ini menjelaskan bahwa diantara pembuat kebijakan dan pemerintah terdapat konsensus bahwa pertambangan skala kecil perlu untuk 'diformalisasi' yang diwujudkan dalam kerangka hukum, dikarenakan pertambangan skala kecil sebagai aktivitas ekonomi informal secara hukum masih ilegal. Berdasarkan studi kasus di Republik Demokratik Kongo (RDK), penelitian ini mengidentifikasi tantangan formalisasi sektor pertambangan skala kecil serta memberikan analisis mendalam tentang kebijakan pelarangan sementara aktivitas pertambangan skala kecil. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa kebijakan pelarangan aktivitas pertambangan sementara yang ditetapkan oleh pemerintah tidak mengatasi berbagai masalah terkait pertambangan skala kecil seperti: konflik, informalitas, kemiskinan, ilegalitas, dan kontrol negara. melihat bukti empiris di lapangan, penelitian ini menekankan bahwa

solusi teknis semacam itu tidak dapat mengatasi permasalahan sosial ekonomi dan politik, dan menyarankan pendekatan kebijakan *bottom-up* dan *context-sensitive formalization*.

Terdapat persamaan serta perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Sara Geenen dengan penelitian ini. Kedua penelitian memiliki kesamaan pada ruang lingkup pembahasan yakni pertambangan skala kecil di Republik Demokratik Kongo (RDK). Kemudian, juga terdapat perbedaan di antara kedua penelitian, dimana fokus pada penelitian yang dilakukan oleh Sara Geenen adalah kebijakan upaya formalisasi sektor tambang skala kecil di RDK, sedangkan pada penelitian ini, peneliti berfokus untuk mengidentifikasi ancaman keamanan manusia dari aktivitas pertambangan skala kecil serta sikap masyarakat internasional terhadap hal tersebut.

Dua studi terdahulu yang ditinjau oleh peneliti secara umum membahas mengenai pertambangan skala kecil, mulai dari ancaman terhadap keamanan manusia yang muncul dari aktivitas pertambangan tersebut, hingga kebijakan dalam rangka upaya memberantas praktik pertambangan ilegal. Tentu, keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Kajian dalam penelitian ini berfokus pada ancaman keamanan manusia timbul dari pertambangan skala kecil ilegal di RDK dan melihat bagaimana sikap masyarakat melihat permasalahan tersebut, yang tidak dibahas di kedua penelitian tersebut.

## 2.4 Ringkasan Penerapan Teori



Gambar 2.2 Bagan Ringkasan Penerapan Teori

Berdasarkan Gambar 2.2, sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat internasional merupakan sikap pro-aktif. Hal ini berdasarkan konsep *human security* yang menerapkan lima pendekatan dalam merespon kondisi ketidakamanan pada satu masyarakat atau populasi. Pendekatan tersebut yakni *people-centred*, *comprehensive*, *context-specific*, *prevention oriented*, dan *protection and empowerment*. Mengacu pada pendekatan *comprehensive*, masyarakat internasional yang terdiri dari organisasi multi-nasional, organisasi

pemerintah internasional, dan organisasi internasional non-pemerintah memiliki bagian untuk berkolaborasi membantu upaya mengatasi ancaman *human security* di RDK yang disebabkan oleh adanya aktivitas pertambangan skala kecil ilegal. Ancaman tersebut meliputi ancaman pada kategori *health security*, *environmental security*, dan *personal security*. Permasalahan inilah yang pada akhirnya membuat masyarakat internasional memutuskan untuk melibatkan diri di dalam isu yang sebelumnya mungkin diklaim sebagai isu domestik suatu negara yang berdaulat. Demi membantu menggarasi ancaman *human security* masyarakat internasional dapat melakukan tindakan – tindakan melalui program untuk memastikan bahwa seseorang, masyarakat atau kelompok bebas dari rasa takut, kekurangan, dan penghinaan (*freedom from fear, want, and to live in dignity*).



**BAB 3****METODE PENELITIAN****3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang – orang di tempat penelitian (Moleong L. J., 2018). Penelitian kualitatif sejatinya digunakan untuk melihat dan mengungkapkan sebuah fenomena dengan menemukan makna permasalahan dalam fenomena tersebut yang tampak pada data berbentuk kualitatif, seperti narasi, kata – kata, gambar, dan peristiwa. Penelitian dengan pendekatan ini menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap sebuah fenomena ataupun masalah dalam penelitian, sehingga deskripsi mengenai situasi, kegiatan, atau peristiwa yang terjadi dapat dijelaskan secara mendetail. Untuk memahami fenomena yang terjadi dengan baik, maka selain memerlukan landasan teori ataupun konsep, peneliti juga memerlukan data yang relevan guna menunjang penelitian ini.

**3.2 Objek dan Fokus Penelitian**

Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah ancaman keamanan manusia dari aktivitas pertambangan skala kecil ilegal di Republik Demokratik Kongo (RDK) serta sikap masyarakat internasional terhadap permasalahan tersebut. Pertambangan mineral di RDK merupakan sumber pendapatan ekonomi negara dan masyarakat. Mayoritas masyarakat hidup dan bergantung dari tambang. Oleh karena itu, fokus penelitian ini mengarah kepada dampak kerusakan lingkungan aktivitas tambang skala kecil mengancam keamanan lingkungan dan kesehatan manusia. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat sikap masyarakat internasional dari adanya permasalahan kemanusiaan berupa ancaman tersebut.

Batasan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni batasan materi, dan batasan waktu. Pertama, batasan materi ditujukan untuk menunjukkan lingkup pembahasan suatu fenomena yang akan diteliti dan



membatasi agar tidak melebar dari topik yang akan dibahas oleh penulis. Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai ancaman keamanan manusia dari pertambangan skala ilegal di RDK serta sikap masyarakat internasional terhadap kondisi tersebut. Kedua, batasan waktu berfungsi untuk menunjukkan rentang waktu terjadinya suatu fenomena yang akan diteliti. Batasan waktu yang digunakan pada penelitian ini dimulai pada 2011 hingga tahun 2022. Tahun 2011 digunakan sebagai awal mula penelitian ketika pemerintah RDK mencabut kebijakan pelarangan aktivitas pertambangan, dan tahun 2022 dipilih karena upaya pemerintah dalam menangani praktik pertambangan ilegal masih belum berhasil dan diindikasikan terdapat ancaman – ancaman terhadap keamanan manusia.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah studi literatur. Data yang dihasilkan dari metode pengumpulan studi literatur adalah data sekunder. Peneliti tidak terjun secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan data, melainkan menggunakan literatur. Data yang dikumpulkan dapat berbentuk buku, jurnal, dokumen, artikel, video, dan bentuk lainnya yang relevan dengan penelitian. Adapun data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti diperoleh dari:

1. Artikel ilmiah dan jurnal, nasional ataupun internasional;
2. Publikasi yang berasal dari penelitian terdahulu;
3. Koleksi pribadi, berupa buku cetak atau elektronik (*e-book*)
4. Laman situs resmi yang dipublikasikan oleh pemerintah maupun organisasi;
5. Laman berita daring ataupun data lainnya yang relevan terkait dengan penelitian.

### **3.4 Keabsahan Data**

Untuk memeriksa keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode triangulasi sumber data. Triangulasi sumber merupakan proses pengujian untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber data (Sapto, H., dkk., 2020).

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis melakukan analisis data berdasarkan pendekatan deskriptif – kualitatif dengan memilah – milah data yang saling berkaitan agar dapat disusun menjadi suatu kesimpulan ilmiah dan objektif. Adapun tiga tahapan analisis data menurut Miles dkk. (2014) yakni:

1. Kondensasi Data

Peneliti merangkum, memilih dan mencatat data penting yang diperoleh pada saat tahapan pengumpulan data penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah data – data dikumpulkan dan telah dilakukan kondensasi data, maka penulis akan menyajikan data dengan melakukan penjabaran dalam bentuk narasi.

3. Penarikan Kesimpulan

Kemudian pada tahap terakhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan serta proses verifikasi. Tahapan ini dilakukan dengan melakukan interpretasi dari makna data yang digunakan pada penelitian.

## BAB 4

**KEGAGALAN REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO MENGATASI  
TAMBANG SKALA KECIL ILEGAL SERTA SIKAP MASYARAKAT  
INTERNASIONAL****4.1 Kegagalan Pemerintah RDK dalam Mengatasi Ancaman *Human Security***

Keberlanjutan permasalahan terkait praktik tambang skala kecil ilegal di RDK, tidak lepas dari kegagalan pemerintah. Salah satu kegagalan nyata pemerintah RDK ialah dengan menempatkan pasukan FARDC (*Armed Forces of the Democratic Republic of Congo*) untuk berjaga di lokasi tambang. Awalnya, pasukan FARDC ditugaskan untuk mengurangi jumlah penambang yang melakukan penambang di wilayah perusahaan, akan tetapi kehadiran FARDC justru memperburuk keadaan di mana FARDC justru melakukan sederet aksi *modern slavery*.

Pemerintah memang mengakui telah ada penyiksaan dan eksploitasi yang dilakukan oleh FARDC dan pemerintah juga telah melakukan peninjauan sesuai dengan aturan yang terdapat pada aturan No. 09/001 Tahun 2009 terkait pelanggaran serta hukuman yang akan diterima oleh pasukan FARDC jika terbukti bersalah. Akan tetapi menurut laporan ILO (*International Labour Organization*), pemerintah RDK justru terkesan tidak transparan terkait peninjauan kasus ini sehingga hingga saat ini tidak ada laporan pasti mengenai hukuman yang diterima oleh FARDC (ILO, 2017).

Terdapat spekulasi yang menyebutkan bahwa pemerintah tidak dapat melawan FARDC dikarenakan pemerintah sendiri sangat membutuhkan FARDC terkait konflik domestik yang terjadi di dalam pemerintahan sehingga memaksa pemerintah memberikan kewenangan yang berlebihan kepada FARDC. Kewenangan inilah yang kemudian membuat FARDC semena – mena menggunakan kuasanya terhadap pekerja di tambang skala kecil. Padahal kasus

penyiksaan dan eksploitasi yang dilakukan oleh FARDC telah masuk ke dalam golongan kejahatan berat (ILO, 2017).

Kewenangan yang diberikan kepada FARDC juga merembet kepada kegagalan beberapa aturan yang dikeluarkan pemerintah. Salah satunya penerapan aturan amandemen pekerja anak yang dilakukan di 2011. Aturan ini menitikberatkan pada 6 poin, yakni

1. Menambah usia minimal pekerja anak menjadi 16 hingga 18 tahun
2. Mengurangi jumlah pernikahan dini
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait risiko pernikahan dini melalui kampanye dan seminar di sekolah dan lembaga pendidikan
4. Meningkatkan kualitas serta kuantitas sektor pendidikan
5. Meningkatkan tingkat keamanan untuk anak – anak
6. Melawan segala tindak tipu daya yang menargetkan anak – anak untuk masuk ke dalam kelompok bersenjata yang bertujuan melawan pemerintah. (ILO, 2017).

Dapat terlihat beberapa poin menargetkan pekerja anak di tambang skala kecil. Akan tetapi aturan ini gagal ketika diterapkan di lapangan. Seperti yang penulis kemukakan sebelumnya bahwasanya usia minimal pekerja anak yang ditemukan di lapangan justru dari 7 hingga 16 tahun. Dari fakta ini saja, aturan ini telah gagal memenuhi target. Di tahun 2012 atau lebih tepatnya 1 tahun pasca ditetapkan aturan ini, telah ada lebih dari 50.000 pekerja anak yang diakomodir oleh FARDC dan pemerintah sama sekali tidak melakukan penindaklanjutan. Parahnya, keadaan dibiarkan begitu saja tanpa penyelidikan lebih lanjut oleh pemerintah. FARDC tetap diberikan kewenangan mengawasi lokasi tambang dan pekerja anak pun masih tetap diperkerjakan (ILO, 2017).

Amnesty Internasional dalam laporannya yang berjudul “*This is What We Die For : Human Rights Abuses in Democratic Republic of the Congo Power the Global Trade in Cobalt*” menyebutkan bahwa tidak adanya kesadaran dari pemerintah, khususnya Kementerian Urusan Buruh. Setelah sederet laporan

penyiksaan dan eksploitasi yang dialami oleh pekerja tambang skala kecil, Menteri hanya mengirim 20 penyelidik ke seluruh RDK. Jumlah ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan banyaknya kasus yang telah dilaporkan. Bahkan tindakan ini mendapatkan protes dari ILO, PBB hingga organisasi hak asasi manusia internasional lainnya (Amnesty International, 2016).

Keadaan ini diperparah dengan fakta bahwa pemerintah justru memungut bayaran untuk penambang skala kecil yang menambang di wilayah perusahaan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan usaha pemerintah untuk mengurangi penambangan di wilayah perusahaan. Sekali lagi, pemerintah pun tidak melakukan apa pun dan terkesan tutup mata dengan pelanggaran *human security* yang terjadi. Pemerintah beralasan bahwa penyelidikan dan pengusutan kasus pelanggaran ini tidak dapat dilakukan secara optimal dikarenakan kekurangan sumber daya serta lokasi tambang yang tergolong terpencil (Amnesty International, 2016).

Ketergantungan pemerintah terhadap FARDC dikarenakan FARDC menjadi garda terdepan dalam menghadapi pemberontak negara, yakni M23 (March 23 Movement) yang berbasis di provinsi Kivu, RDK bagian timur. Pemerintah beralasan bahwa pemberontakan M23 telah sampai membunuh warga lokal dan menyebabkan kepanikan sehingga negara merasa perlu bertindak dengan menjaga keamanan warga melalui bantuan yang diberikan oleh FARDC. Akan tetapi kenyataannya, pasukan FARDC justru tidak menggunakan kewenangan yang diberikan negara dengan baik. Tambang – tambang yang seharusnya menjadi sumber pendapatan negara justru dimonopoli dan dijadikan markas FARDC (Koning, 2011).

Di sana, FARDC memungut pajak untuk setiap operasionalisasi tambang. Tidak hanya itu, FARDC juga menjual hasil mineral secara diam – diam di pasar gelap. Aksi FARDC inilah yang menjadikan negara sulit menyelesaikan isu ancaman *human security* di timur RDK. Di satu sisi, negara ingin segera menyelesaikan pelanggaran hak asasi tambang skala kecil dan untuk mewujudkan hal ini negara harus mengusir FARDC dari lokasi tambang. Jika FARDC diusir,

maka pemberontakan akan semakin merajalela (ICRC, 2023). Hal ini membuat tambang skala kecil menjadi salah satu bahan bakar dan pemicu konflik domestik.

Kegagalan pemerintah dalam memberantas korupsi juga berperan penting terhadap menjamurnya praktik pertambangan ilegal tersebut. Sektor pertambangan di RDK sudah terlalu lama rentan terhadap eksploitasi oleh politisi dan pengusaha korup (Global Witness, 2015). Penyuapan, pemerasan, dan perdagangan gelap yang merajalela sudah menjadi hal biasa, sehingga melemahkan penghidupan para pelaku penambang dan melanggengkan siklus kemiskinan. Hal ini sejalan dengan data indeks korupsi global dimana RDK memperoleh skor 20 dan berada pada peringkat 166 dari 180 negara di tahun 2022 (Transparency International, 2022). Praktik korupsi yang dilakukan dalam perizinan dan pengawasan tidak hanya menghilangkan pendapatan yang seharusnya masuk ke negara. korupsi yang berujung pembiaran dapat memicu terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM. Dampak buruk terhadap lingkungan juga sama parahnyanya. Karena para penambang yang didorong untuk memuakan pejabat korup, sering kali menggunakan metode yang merusak sehingga semakin memperburuk tantangan ekologi yang dihadapi RDK.

Selain korupsi, pemerintah juga gagal mendorong masyarakat untuk beralih profesi dari penambang skala kecil ilegal. Terdapat beberapa alasan mengapa masyarakat memilih untuk bekerja di tambang skala kecil ilegal. Selain kemiskinan juga terdapat tiga alasan penambang memilih bekerja di tambang skala kecil ilegal (Geenen dkk., 2021). Pertama, pekerjaan di tambang skala kecil ilegal relatif mudah diakses dan fleksibel, yang hanya memerlukan modal awal atau pendidikan formal yang minim. Hal ini begitu penting utamanya di negara yang memiliki keterbatasan akses kesempatan kerja formal dan kurangnya pendidikan dan pelatihan keterampilan. Kedua, tambang skala kecil ilegal menarik seseorang untuk mendapatkan hasil tambang yang melimpah dengan nilai ekonomi sangat tinggi dibandingkan mata pencaharian yang lain. Selain itu, para penambang tambang skala kecil ilegal merasa mereka dalam kelompok dengan nasib sosial dan ekonomi yang sama.

Dampak dari ketidakberhasilan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tambang skala kecil ilegal mengancam keamanan serius yang berdampak terhadap populasi RDK. Praktik tambang skala kecil ilegal yang mampu menciptakan penderitaan terhadap populasi tersebut dapat dilihat sebagai suatu tindak kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan dapat diartikan sebagai setiap tindakan – tindakan dimana ketika dilakukan, sebagai bagian dari serangan yang luas atau sistematis ditujukan terhadap penduduk sipil (ICC, 2011). Tindakan ini dapat muncul baik pada saat konflik ataupun non-konflik. Elemen dari kejahatan kemanusiaan sendiri meliputi, *physical*, *contextual*, dan *mental element*. Tindakan – tindakan sesuai elemen tersebut seperti, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan secara paksa, pemenjaraan atau perampasan kebebasan fisik lainnya yang melanggar dasar aturan hukum internasional, penyiksaan, kekerasan seksual, persekusi terhadap kelompok atau etnis, pengasingan, kejahatan *apartheid*, dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang bersifat serupa menimbulkan penderitaan berat, atau cedera serius terhadap tubuh, mental ataupun fisik (ICC, 2011).

Menggunakan perspektif *human security*, dapat diidentifikasi ancaman – ancaman terhadap keamanan populasi di RDK sebagai kejahatan kemanusiaan dan ancaman kemanusiaan lainnya secara lebih menyeluruh. Dari tujuh kategori keamanan dalam konsep *human security*, tambang skala kecil ilegal memunculkan *health insecurity*, *environmental insecurity*, dan *personal insecurity*. Masing – masing kategori tersebut menciptakan kondisi tidak manusiawi yang menimbulkan penderitaan hingga cedera serius terhadap tubuh, mental dan fisik. Dalam hal ini negara dan organisasi yang merupakan tambang skala kecil ilegal terlibat dalam tindakan tersebut.

#### **4.1.1 Health Insecurity**

Ancaman terhadap keamanan kesehatan ialah dimana tidak terpenuhinya keamanan dan kenyamanan masyarakat dari jaminan kesehatan. Para pekerja tambang skala kecil terpaksa untuk bekerja pada kondisi memprihatinkan yang mengancam kesehatannya. Dari sekitar 200.000 tambang mineral kobalt di seluruh kawasan RDK, sebagian besar beroperasi dengan mengabaikan faktor kesehatan

pekerjanya (Kayembe, 2022). Lokasi galian atau pertambangan tidak dilengkapi dengan peralatan perlindungan dan keselamatan. Selain itu, lokasi pertambangan banyak yang tidak memiliki fasilitas seperti tempat peristirahatan, air bersih, bahkan toilet. Hal ini memaksa para pekerja untuk memenuhi kebutuhannya dilakukan di sembarang tempat, seperti aliran air ataupun sungai yang tidak memiliki sistem pengolahan limbah.

Selain itu, juga terdapat ancaman kesehatan berupa penyakit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Bushenyula dkk., (2023) para pekerja dan masyarakat rentan menderita penyakit seperti diare, malaria, TBC, hingga penyakit menular seksual. Selain itu juga terdapat bahaya psikososial dan biomekanik seperti stres dan kelelahan akut. Kedua permasalahan tersebut muncul didorong oleh faktor kurangnya fasilitas air bersih, MCK, dan peristirahatan sebelumnya. Dalam praktik pertambangan skala kecil, para pekerja diharuskan bekerja dengan beban yang berat, berulang – ulang, dan jam kerja yang begitu panjang. Semua itu dilakukan umumnya hanya menggunakan alat tradisional atau sederhana yang memperparah kondisi psikososial dan biomekanik. Adapun bahaya kesehatan dari paparan bahan kimia yang digunakan selama aktivitas pertambangan. Para pekerja terancam terpapar bahan kimia seperti merkuri, silika, arsenik, timbal, metana, *sulfur dioxide*, *nitrous oxide*, *carbon monoxide*, dan sianida. Nkuba dkk., (2019) menjelaskan bahwa berdasarkan penelitian studi kasus di tambang emas Kamituga, ditemukan penggunaan merkuri dalam pengolahan emas. Keracunan merkuri dapat dikaitkan dengan gangguan neurologis, ginjal, dan auto imun. Sedangkan paparan inhalasi yang tinggi dapat menyebabkan kegagalan pernafasan dan kematian. Keracunan merkuri juga dapat menghambat perkembangan motorik dan mental. Selain itu juga ditemukan banyak kasus gangguan kehamilan yang menyebabkan cacat lahir dari paparan bahan logam dan kimia beracun tambang (Brusselen, 2020).

#### **4.1.2 Environmental Insecurity**

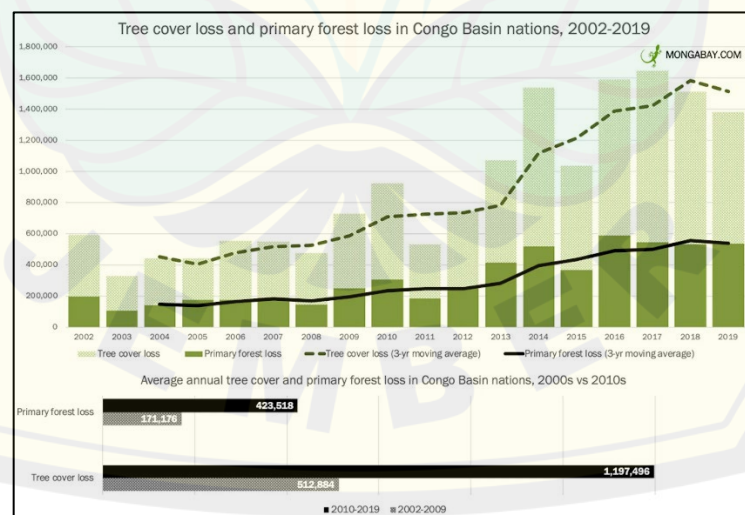
Lingkungan menjadi salah satu elemen yang terdampak dari adanya praktik tambang skala kecil. Kondisi tambang skala kecil di RDK tidak hanya mengakibatkan timbulnya ancaman dari kesehatan tapi juga berdampak pada



kerusakan lingkungan. RDK merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Selain kekayaan mineral, RDK juga memiliki hutan serta sumber air yang mumpuni. Akan tetapi akibat maraknya praktik tambang ilegal mengakibatkan kerusakan lingkungan secara perlahan (UNEP, 2017).

Salah satu penyebab dari kerusakan lingkungan tersebut adalah pencemaran dari limbah penggunaan bahan kimia yang digunakan dalam praktik pertambangan skala kecil di RDK. Pada tahun 2018, tercatat bahwa sektor tambang skala kecil mengeluarkan emisi sekitar lebih dari 800.000 kg merkuri (UNEP, 2019). Kemudian menurut UNEP (2022), tambang emas skala kecil di RDK bertanggung jawab terhadap emisi merkuri yang dilepaskan ke lingkungan sebanyak 2.3 ton. Hal ini menjadikan RDK sebagai salah satu negara yang berkontribusi terhadap emisi merkuri terbesar secara global.

Menurut laporan UNEP (*United Nations Environment Programme*) menyebutkan RDK telah menunjukkan adanya tingkat deforestasi serta degradasi yang tinggi akibat tambang skala kecil. Hutan – hutan di RDK setiap tahunnya terus mengalami degradasi. Luas hutan yang awalnya 285.400 HA di tahun 1990 – an pun berkurang drastis menjadi 181.500 HA pada tahun 2000 – an dikarenakan tingginya tingkat kerusakan hutan akibat penambangan skala kecil (UNEP, 2017).



Gambar 4.1 Kondisi Hutan di RDK

Sumber: (Butler, 2020)

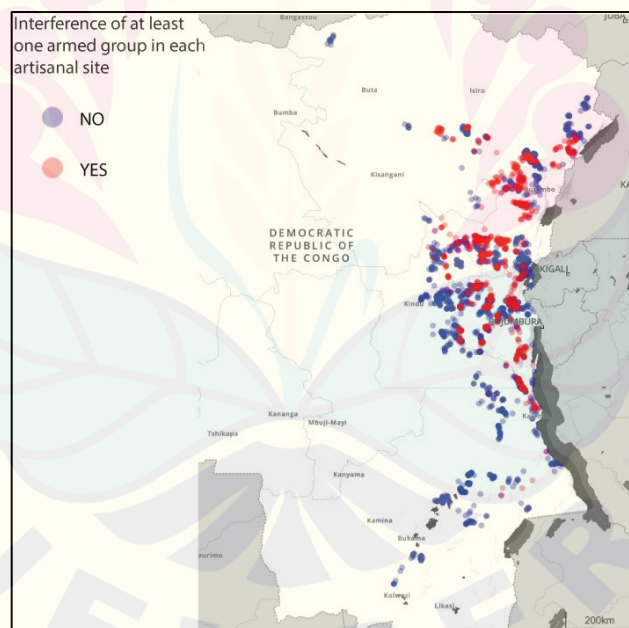
Berdasarkan Gambar 4.1, setiap tahunnya dari 2011 hingga 2019 tren angka kerusakan hutan terus menerus meningkat. Tercatat pada tahun 2016 RDK kehilangan sekitar 590.000 ha kawasan hutan dan 1.590.000 ha tutupan pohon. Selanjutnya pada tahun 2017 RDK kehilangan sekitar 570.000 ha kawasan hutan dan 1.620.000 ha tutupan pohon. Pada dua tahun tersebut RDK mengalami penyusutan kawasan hutan dan tutupan pohon tertinggi selama periode lebih dari 1 dekade. Dalam rata – rata selama periode 2002 hingga 2009 angka penyusutan kawasan hutan di RDK tercatat sejumlah 171.176 ha, angka tersebut meningkat pada periode 2010 – 2019 sejumlah 423.518 ha sementara kawasan tutupan pohon dari 512.884 ha meningkat 1.197.498 ha. Sementara itu, apabila menurut Global Forest Watch (2023), antara tahun 2011 dan 2022, RDK mengalami pengurangan kawasan hutan dan tutupan pohon sebesar 13.5 juta hektar, yang menghasilkan emisi setara dengan 8.60 gigaton karbon dioksida.

Keseluruhan kerusakan lingkungan tidak hanya mengakibatkan berkurangnya jumlah hutan tetapi juga dapat menyebabkan bencana alam, terancamnya satwa liar serta mengganggu kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang (Butler, 2013). Ancaman bencana alam tersebut seperti, banjir, tanah longsor, kekeringan, erosi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Aktivitas pertambangan yang mengeluarkan sejumlah besar limbah beracun terhadap lingkungan menyebabkan pencemaran parah terhadap air, tanaman pangan, dan udara di kawasan, berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya (Muimba-Kankolongo dkk, 2022). Kondisi ini berpengaruh besar terhadap keberlangsungan hidup, dan dapat meninggalkan penderitaan terhadap masyarakat. Dalam aspek polusi udara saja, mampu menimbulkan dampak buruk yang signifikan terhadap populasi terutama dalam aspek kesehatan. Mulai dari penyakit pernapasan hingga kondisi yang mengancam jiwa, dampaknya terhadap kesehatan sangatlah luas. Anak – anak khususnya, dihadapkan pada ancaman berbahaya dimana ketika tubuh mereka yang sedang berada di dalam tahapan tumbuh-kembang rentan terhadap gangguan kesehatan tersebut. Berdasarkan pengamatan Muimba-Kankolongo dkk. (2022), sampel urine yang dikumpulkan dari anak – anak dari RDK mengandung jejak logam berbahaya

ditas ambang batas WHO, serta lebih terkontaminasi dibandingkan sampel yang ditemukan pada orang dewasa. Polusi udara saja mampu menurunkan kualitas hidup dan membatasi aktivitas di luar ruangan.

#### 4.1.3 *Personal Insecurity*

Ancaman *human security* terakhir ialah *personal security* yang merujuk pada adanya keamanan personal yang terganggu akibat kondisi lingkungan sekitar. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwasanya tambang skala kecil termasuk praktik ilegal di mana praktik ini mengeksploitasi sumber daya mineral di wilayah perusahaan resmi. Untuk mencegah timbulnya eksploitasi dari penambang skala kecil ini, maka ditempatkan pasukan bersenjata di wilayah tambang. Pasukan bersenjata ini disebut FARDC (*Armed Forces of the Democratic Republic of Congo*) di mana pasukan ini terdiri dari kekuatan militer baik itu milik pemerintah maupun orang yang diperintahkan oleh perusahaan terkait (Nabila N., 2020).

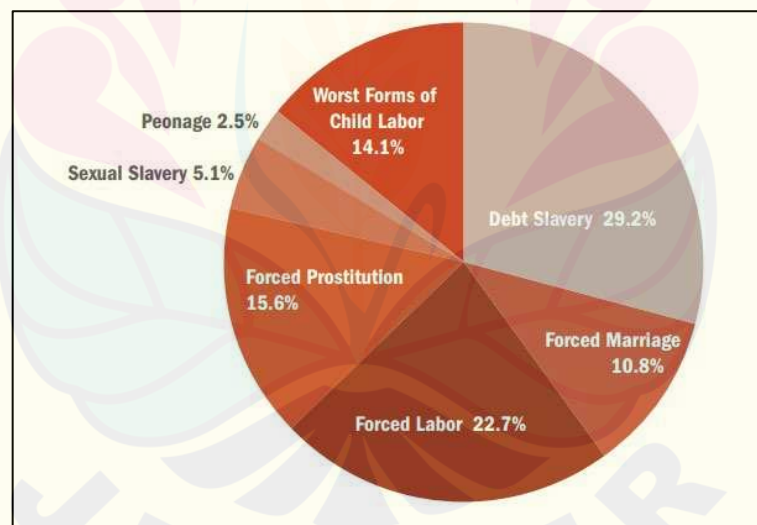


Gambar 4.2 Persebaran Kelompok FARDC di Seluruh Lokasi Tambang Mineral di RDK  
Sumber : (Christoper, C. M. Kyba, 2019)

Berdasarkan Gambar 4.2 terlihat bahwa FARDC kerap ikut campur dalam menangani masalah tambang skala kecil di seluruh wilayah RDK. Dalam rentang 2013 hingga 2015, FARDC telah menjaga lebih dari 1.000 wilayah tambang. Akan

tetapi, FARDC kerap bertindak jauh dengan menggunakan jalan kekerasan dalam menyelesaikan isu ini. Sejauh ini, penulis menemukan bukti bahwasanya ancaman *personal security* tambang skala kecil di RDK bersumber dari *modern slavery* (Free the Slaves, 2013).

FTS (*Free the Slaves*) yang merupakan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) berbasis di provinsi Kivu Selatan juga membuat laporan terkait adanya *modern slavery* di lokasi tambang di Kivu (Free the Slaves, 2013). *Modern slavery* sendiri merupakan situasi di mana seseorang atau kelompok tengah dieksploitasi akan tetapi mereka tidak dapat keluar atau pun menghindari situasi tersebut dikarenakan ada ancaman, paksaan, penyalahgunaan kekuasaan dan lain – lain. Praktik *modern slavery* akan melahirkan bentuk pelanggaran *human security* lainnya seperti kerja paksa, *human trafficking*, pekerja anak dan lain – lain (Wikara, 2022). FTS menyebutkan penyiksaan pada penambang skala kecil termasuk *modern slavery*.



Gambar 4.3 Presentase Jenis - Jenis *Modern Slavery*

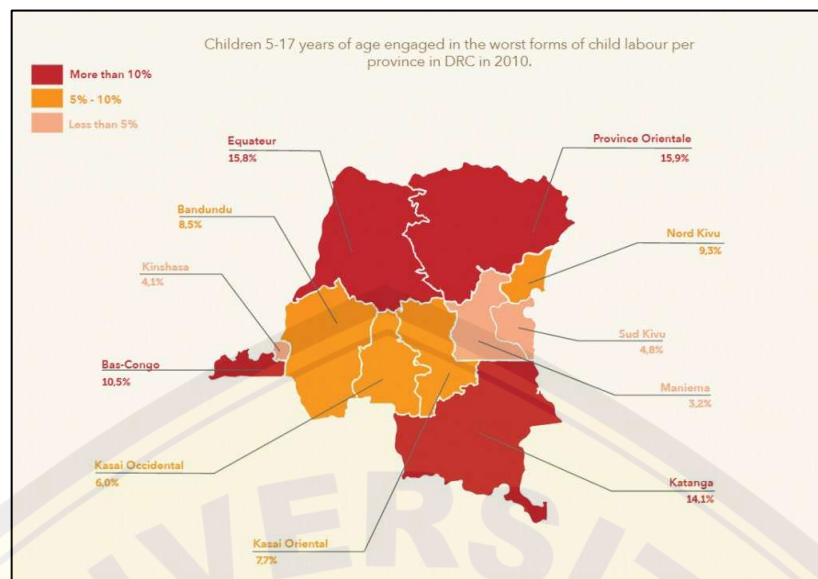
Sumber: (Free the Slaves, 2013)

Berdasarkan laporan penelitian di tiga tambang utama di Kivu Selatan, yakni Kamituga, Lugushwa dan Nyamurhale dengan 866 responden (Gambar 4.3). FTS menemukan fakta bahwasanya terdapat praktik kerja paksa serta perbudakan berbasis hutang di tiga tambang di Kivu Selatan. Sebagian besar penambang skala

kecil berasal dari keluarga miskin sehingga rentan terkena jeratan hutang yang akhirnya memaksa mereka untuk bekerja sebagai penambang ilegal. Pola semacam ini yang akhirnya mendatangkan berbagai pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) lainnya seperti kerja paksa, prostitusi serta pekerja anak (Free the Slaves, 2013).

Selain itu, *modern slavery* di lokasi tambang juga terdapat di RDK bagian selatan. RDK bagian selatan merupakan wilayah yang kaya akan sumber mineral 3T. Di dalam penyelidikan ini, FTS bekerja sama dengan sejumlah organisasi seperti PBB, perwakilan pemerintah serta LSM lokal lainnya. Target penyelidikan kali ini dilakukan di Goma, Bukavu dan lain – lain. Berbeda dengan Kivu Selatan, di RDK bagian selatan justru bentuk *modern slavery* lebih didominasi oleh kekerasan serta eksploitasi yang dilakukan oleh FARDC. FARDC menjadi dalang kerja paksa di mana para warga lokal kerap dipaksa untuk menambang menggunakan senjata api (Free the Slaves, 2011).

Penambang ini sering tidak dibayar dan harus bekerja di lingkungan yang keras di mana mereka diwajibkan mencari mineral dengan cara menggali dengan tangan kosong. Parahnya, pemerintah sendiri yang menyuruh FARDC melakukan hal tersebut kepada warga lokal. Akibat dari tindakan ini, sekitar 15 penambang pun dikabarkan meninggal dunia. Selain korban jiwa, kerja paksa ini juga menimbulkan dampak lainnya seperti malnutrisi, trauma psikis, sanitasi yang buruk serta gangguan kesehatan lainnya (Free the Slaves, 2011).



Gambar 4.4 Pekerja Anak di RDK

Sumber: (Relief Web, 2015)

Bentuk *modern slavery* lainnya ialah pekerja anak. Dapat terlihat dari peta di Gambar 4.4, bahwasanya pekerja anak di RDK telah berada dalam tahap mengkhawatirkan. Pekerja anak yang berada di sektor tambang skala kecil menyebar secara menyeluruh di negara ini. Apalagi jika dilihat pada wilayah berwarna merah yang mendominasi yang berarti persentase pekerja anak di wilayah tersebut lebih dari 10%. Tingginya angka pekerja anak ini tidak bisa dilepaskan dari lemahnya pengawasan pemerintah terhadap tambang skala kecil yang mengakibatkan anak – anak di bawah umur terpaksa bekerja di lingkungan yang tidak aman. Ditambah umur minimum pekerja anak di tambang skala kecil dimulai dari usia 5 tahun (Relief Web, 2015).

Salah satu bukti dikemukakan oleh Amnesty International (2016), dalam laporannya ditemukan bahwa tambang kobalt menjadi satu dari sekian banyak sumber tambang yang banyak mempekerjakan pekerja anak. Sekitar setengah jumlah kobalt dunia dapat ditemukan di RDK. Dikarenakan hal inilah banyak perusahaan asing seperti Apple, Tesla, Ford hingga Microsoft pun berinvestasi di tambang kobalt di RDK. Akan tetapi peluang investasi asing ini justru menjadikan jumlah pekerja anak di tambang skala kecil semakin meningkat tajam. Anak – anak

ini dibayar kurang dari US\$ 1 perharinya. Pekerja anak diwajibkan untuk masuk ke dalam gua – gua tanpa pengamanan apa pun dan dapat runtuh kapan saja. Bahkan tak jarang ditemukan pekerja anak yang meninggal dunia dikarenakan kecelakaan kerja (Amnesty International, 2016).

Kurangnya peralatan perlindungan dan keselamatan mengharuskan pekerja membayar dengan taruhan nyawa dari ancaman kecelakaan kerja. Tercatat dalam beberapa tahun terakhir terjadi beberapa kecelakaan kerja yang memakan korban jiwa. Pada tahun 2019 terjadi insiden di lokasi pertambangan emas Kampene, Provinsi Meniema dimana setidaknya 22 orang meninggal dunia akibat tertimbun galian tambang (Adebayo, 2019). Tidak hanya itu pada tahun berikutnya, insiden serupa terjadi lagi di tambang emas Kamituga, Provinsi Kivu Selatan, yang menelan 50 korban jiwa (Al Jazeera, 2020). Lebih lanjut pemerintah RDK tidak mempublikasikan data lebih rinci terkait angka jumlah insiden kecelakaan tambang per tahunnya.

Tidak hanya itu juga beberapa perusahaan dari China ditemukan melakukan praktik penyalahgunaan serta eksploitasi terhadap pekerja anak di mana mereka harus bekerja di kondisi yang keras dan tidak layak. Para penambang yang berasal dari tambang skala kecil ini umumnya dipekerjakan oleh perusahaan China di sekitar wilayah sumber kobalt dan tembaga tanpa peralatan pertambangan yang layak. Hal ini memaksa mereka harus mencari mineral dengan menggunakan tangan kosong (Amnesty International, 2013).

Bentuk *modern slavery* yang lain ialah adanya kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan yang bekerja sebagai penambang ilegal di tambang skala kecil. World Bank menyebutkan bahwa 40% dari 2 juta penduduk RDK yang bekerja di tambang skala kecil merupakan perempuan. Tingginya jumlah perempuan dalam sektor ini pun menyebabkan angka kekerasan seksual terhadap perempuan tergolong tinggi. Bahkan angka pemerkosaan di wilayah RDK bagian selatan tergolong sangat tinggi hingga diberi sebutan “*rape capital of the world*”. Sebutan ini ditujukan kepada kasus pemerkosaan dikarenakan adanya konflik mineral (Siri Aas Rustad, 2016). Masih dapat ditemukan praktik perbudakan

seksual, digambarkan sebagai seseorang yang menerapkan kekuasaan kepemilikan atas orang lain, seperti menahan atau merampas kebebasan seseorang, atau membeli, menjual dan menukar orang tersebut untuk tujuan seksual. Berdasarkan penelitian lembaga Free the Slaves (2013), ditemukan bahwa di area tambang Kamituga, Lugushwa dan Nyamurhale sebanyak 31 perempuan dan 19 anak – anak perempuan dibawah umur menjadi korban perbudakan seksual. Data ini didukung dengan laporan USAID (2014), yang menjelaskan mengenai kasus perdagangan manusia di komunitas pertambangan skala kecil kawasan timur RDK, ditemukan bahwa dari 1.522 responden dari 32 lokasi, 102 orang menjadi korban perdagangan manusia, 14 orang terlibat perdagangan seksual, 6 diantaranya merupakan anak – anak di bawah umur.

#### **4.2 Sikap Masyarakat Internasional terhadap Isu *Human Security* Tambang Skala Kecil di RDK**

Isu *human security* yang muncul dari adanya aktivitas pertambangan ilegal tidak lagi menjadi perhatian dalam ruang lingkup negara RDK, tetapi telah meluas kepada aktor – aktor internasional. Keterlibatan aktor internasional dalam mengatasi masalah *human security* sangatlah penting di dunia yang saling terhubung saat ini. Keamanan tersebut mencakup berbagai permasalahan yang mengancam kesejahteraan dan martabat individu dan komunitas, termasuk namun tidak terbatas pada konflik bersenjata, kemiskinan, penyakit, degradasi lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pada konteks Republik Demokratik Kongo (RDK), masyarakat internasional memiliki peran untuk menanggapi ancaman *human security* dari adanya aktivitas pertambangan skala kecil. Dalam menanggapi ancaman tersebut, masyarakat internasional dapat menerapkan pendekatan komperhensif (*comprehensive*) dan berpusat pada individu atau masyarakat (*people-centred*). Dengan menyoroti saling keterhubungan berbagai kerentanan, *human security* memerlukan pembentukan sebuah sistem terkait yang terdiri dari beragam kontributor. Jaringan ini kemudian memberikan manfaat dari spektrum yang luas,



mencakup masyarakat internasional terdiri dari entitas – entitas di PBB, serta sektor swasta dan publik, yang mencakup domain lokal, nasional, regional, dan global.

Masyarakat internasional, berpedoman pada prinsip – prinsip dalam pendekatan *human security*, dengan sungguh – sungguh berupaya mendukung dan membantu upaya mencapai “*freedom from want, fear, and dignity*”. Komitmen kolektif tersebut muncul dari pengakuan bahwa aspirasi mendasar ini bersifat universal dan melampaui batas – batas negara. Kebebasan dari rasa takut (*fear*) menekankan pentingnya untuk melindungi individu dan komunitas dari dan tidak hanya terbatas pada kekerasan, konflik dan penganiayaan. Masyarakat internasional memiliki andil untuk membantu menciptakan lingkungan dimana masyarakat dapat hidup tanpa adanya ancaman, penindasan, serta menjamin keamanan fisik dan psikologis mereka dari tambang skala kecil ilegal.

Pada saat yang sama, komitmen terhadap kebebasan dari keinginan (*want*) menggarisbawahi tanggung jawab bersama untuk mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan kekurangan dalam skala global. Masyarakat internasional mengakui bahwa akses terhadap kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan, sangat penting bagi seorang individu untuk menjalani kehidupan yang berkecukupan. Dengan memobilisasi sumber daya, mendorong pembangunan ekonomi, dan sosial, masyarakat internasional dapat membantu menciptakan kondisi yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Kemudian pada aspek terakhir kebebasan hidup bermartabat (*live in dignity*) mencakup pengakuan dan penegakan nilai dan hak yang melekat pada tiap – tiap individu, tanpa memandang latar belakang mereka, memastikan bahwa semua orang dapat memiliki kesempatan untuk hidup secara hormat, bermartabat, tanpa adanya diskriminasi. Masyarakat internasional mampu membantu memperjuangkan martabat manusia dengan mengadvokasi kesetaraan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia, berupaya untuk mewujudkan dunia dimana setiap orang dapat menjalani kehidupan yang bermartabat.

Berdasarkan hal tersebut, keterlibatan masyarakat internasional untuk membantu mengatasi permasalahan *human insecurity* yang muncul sebagai akibat

dari adanya praktik pertambangan skala ilegal di RDK dapat dilihat sebagai sebuah sikap pro-aktif. Sikap tersebut diwujudkan melalui tindakan – tindakan membantu masyarakat terdampak, merespon ketidakamanan di masyarakat, dan berupaya untuk menyelesaikannya.

Tindakan bantuan kemanusiaan internasional mempunyai berbagai bentuk yang mencerminkan berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat internasional untuk mengatasi krisis, memberikan bantuan, dan menegakkan hak asasi manusia. Pada isu *human insecurity* di RDK respon atau tindakan masyarakat dilakukan dalam program – program atau inisiatif yang menyediakan bantuan kemanusiaan, bantuan pembangunan, keamanan, hingga kesiapsiagaan bencana dan penanggulangan resiko.

#### 4.2.1 PBB

PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) melalui inisiatif dan organisasi dibawahnya menjadi salah satu aktor yang terlibat dalam upaya membantu RDK terkait isu yang menyelumuti industri tambang skala kecil ilegal. Inisiatif dan organisasi ini berkolaborasi dengan pemerintah RDK dan pemangku kepentingan lokal untuk mengatasi tantangan kompleks terkait praktik tambang skala kecil ilegal. Hal ini juga mencakup isu *human security*, seperti pekerja anak, pendanaan konflik, degradasi lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa bentuk inisiatif dan organisasi PBB terkait isu tambang skala kecil ilegal di RDK seperti, *United Nations Development Programme (UNDP)*, *United Nations Environment Program (UNEP)*, dan *United Nations Children's Fund (UNICEF)*

UNDP berkontribusi dalam upaya mengatasi permasalahan kompleks seputar tambang skala kecil di RDK. Sektor tambang yang ilegal, kurangnya pengaturan, dan berbagai tantangan termasuk kondisi *human security* menjadi perhatian penting UNDP. Mengatasi tantangan – tantangan ini sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan di RDK. Menurut pengamatan UNDP (2019), sekitar 80% penambangan dilakukan secara tradisional dan menggunakan teknik manual sederhana, dengan 40 hingga 50% perempuan terlibat mengalami masalah ketenagakerjaan dan sosial. Metode pertambangan tersebut dapat menyebabkan

konflik dan degradasi lingkungan serta memperburuk kesenjangan gender dan kemiskinan.

Pada tahun 2019 UNDP, merilis “*Draft Country Programme Document for the Democratic Republic of the Congo (2020–2024)*” yang memuat program UNDP di RDK. Didalamnya UNDP menjelaskan tiga prioritas, (1) tata kelola untuk pembangunan berkelanjutan; (2) transformasi ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan (3) dukungan terhadap stabilisasi dan penguatan ketahanan masyarakat. Merujuk pada kedua UNDP akan mendukung pemerintah dalam mencapai transformasi struktural menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan pembangunan manusia. Dukungan ini selanjutnya akan berfokus pada tindakan – tindakan yang kondusif bagi pengentasan kemiskinan, kesenjangan, rasionalisasi penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan perjuangan melawan perubahan iklim. UNDP juga bekerja sama dengan pemerintah RDK dan mitra lokal untuk memformalisasi sektor tambang skala kecil. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kerangka hukum dan peraturan yang mengatur aktivitas pertambangan yang bertanggung jawab, dan memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan sosial. Lebih lanjut, beberapa program tersebut dapat saya jelaskan pada tabel berikut,

Tabel 4.1 Outcome Draft Country Programme for Democratic Republic of the Congo (2020-2024)

No.	Keluaran Program Negara (Indikatif)	Kolaborasi	Dana (\$)
1.	Pengembangan solusi untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, termasuk komoditas berkelanjutan dan rantai nilai yang ramah lingkungan serta inklusif dengan akses bagi perempuan dan pemuda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan</li> <li>• Pusat Penelitian dan Teknologi</li> <li>• Agence Nationale de Promotion des investissements</li> <li>• Sektor Swasta</li> <li>• CSO's</li> </ul>	<p><b>Reguler</b> 49.500.000</p> <p><b>Lainnya</b> 268.000.000</p>
2.	Perempuan dan pemuda dimungkinkan untuk mengakses dan terlibat dalam skema pekerjaan dan penghidupan yang layak di sektor pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Pertambangan</li> <li>• CSO's</li> <li>• Sektor Swasta</li> </ul>	

3.	Kelompok marjinal dan rentan, khususnya masyarakat miskin, perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, diberdayakan untuk mendapatkan akses terhadap layanan keuangan untuk membangun kapasitas produktif berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Perencanaan</li> <li>• Kementerian Keuangan</li> <li>• Masyarakat Sipil</li> <li>• Sektor Swasta</li> </ul>	
4.	Memperkuat kapasitas teknis komunitas dan lembaga lokal untuk pecegahan dan pengelolaan konflik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Provinsi</li> <li>• Majelis Provinsi</li> <li>• Tokoh Masyarakat</li> <li>• Kelompok Agama</li> <li>• Organisasi Pemuda dan Perempuan</li> </ul>	<b>Reguler</b> 11.896.000  <b>Lainnya</b> 38.000.000
5.	Instansi pemerintah dan masyarakat di tingkat lokal dan pusat, mampu secara efektif mendorong kesetaraan gender serta mencegah dan melawan kekerasan berbasis gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Keluarga dan Gender</li> <li>• Kementerian Kehakiman</li> <li>• Pemerintah Provinsi</li> <li>• Majelis Provinsi</li> <li>• Masyarakat</li> <li>• Pusat Kesehatan dan Rumah Sakit</li> </ul>	
6.	Memperkuat kapasitas teknis lembaga dan masyarakat untuk mengatasi krisis serta bencana alam dan iklim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Kemanusiaan</li> <li>• Pemerintah Provinsi</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>	

Sumber: (UNDP, 2019)

Selanjutnya UNEP juga memberikan dukungan dengan terlibat aktif dalam mengatasi tantangan lingkungan dan sosial yang terkait dengan pertambangan skala kecil di RDK. Mereka berfokus pada upaya mendorong praktik pertambangan yang ramah lingkungan dan meningkatkan sumber penghidupan para penambang serta masyarakat terdampak (UNEP, 2017). Beberapa aspek penting dari dukungan UNEP meliputi, (1) analisis mengenai dampak lingkungan; (2) *capacity building*; (3) kemitraan dan jembatan pemangku kepentingan; (4) riset dan pengumpulan data; dan (3) advokasi serta kesadaran. Sejak tahun 2008, UNEP mendirikan program negara dan kantor di Kinshasa, sebagai tanggapan atas permintaan dari pemerintah RDK sendiri.

Melalui dukungan UNEP diluncurkan berbagai program dengan mitra internasional. Salah satu program tersebut terkait dengan kerja sama penanggulangan masalah penggunaan merkuri di tambang skala kecil. Didukung bersama *Global Environment Facility* (GEF) dan *Centre Africaine pour la Santé et l'Environnement* (CASE) dibawah program PlanetGOLD dipimpin UNEP sendiri, menjalankan proyek untuk pembangunan jangka panjang sektor tambang skala kecil yang akan mendorong pemanfaatan teknologi pengolahan bebas dari bahan kimia merkuri di RDK (UNEP, 2022). Program ini sekaligus diharapkan mampu meningkatkan akses terhadap pasar dan keuangan bagi para pelaku tambang dengan saat yang sama mengurangi dampak industri terhadap lingkungan.

Tabel 4.2 Program UNEP di Republik Demokratik Kongo (RDK)

No.	Program/Proyek	Deskripsi
1.	Collaborative Effort with Partners (Starting - 2023)	Program kolaboratif UNEP dengan Pemerintah RDK melibatkan lebih dari 50 mitra termasuk kementerian dan lembaga pemerintah, PBB, dan organisasi internasional lainnya
2.	UNEP- DRC Special Programme Projects Detail Program: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Klasifikasi Negara</b> : Negara Tertinggal</li> <li>• <b>Dana Perwalian Program Khusus</b> : USD \$500.000</li> <li>• <b>Total Pembiayaan Bersama</b> : USD \$163.000</li> <li>• <b>Durasi</b> : 36 Bulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciptakan mekanisme terpusat untuk mengkoordinasikan pengelolaan bahan kimia dan limbah di tingkat nasional</li> <li>• Melaksanakan program komperhensif untuk meningkatkan kesadaran, memberikan pelatihan, dan membangun kapasitas</li> <li>• Membangun platform nasional terpadu untuk pengelolaan bahan kimia dan limbah, memfasilitasi pertukaran informasi dan pengelolaan pengetahuan</li> <li>• Merumuskan regulasi yang menangani pengelolaan bahan kimia dan limbah</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan uji coba pendekatan ekonomi sirkular untuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas</li> </ul>
--	--	---

Sumber: (UNEP, 2023 & 2023a)

Apabila dukungan melalui program UNDP dan UNEP lebih berfokus pada aspek pembangunan berkelanjutan dan lingkungan, UNICEF secara intensif memberikan dukungan terhadap anak – anak yang terlibat dalam praktik pertambangan skala kecil di RDK. UNICEF secara aktif berupaya membantu mengatasi pekerja anak di pertambangan skala kecil melalui berbagai inisiatif. Didalam upaya tersebut mereka memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan kejuruan terhadap anak – anak yang terlibat. Upaya advokasi pemberantasan pekerja anak di pertambangan juga dilakukan melalui pengembangan kebijakan dan kampanye. UNICEF juga mendukung program masyarakat yang bertujuan meningkatkan penghidupan dan mengurangi ketergantungan, memaksa anak terlibat dalam pertambangan. Kolaborasi dengan lembaga pemerintah maupun mitra lainnya juga digadang untuk memperkuat sistem perlindungan anak. Dukungan ini bersifat jangka panjang, dimana pada tahun 2020, UNICEF bekerja sama dengan *Global Battery Alliance* (GBA), bertujuan untuk mengumpulkan dana \$21 juta dollar dari mitra pemerintah dan swasta selama tiga tahun ke depan untuk digunakan mendanai serangkaian inisiatif yang bertujuan mengatasi akar permasalahan pekerja anak di komunitas pertambangan skala kecil (UNICEF, 2020). Lebih lanjut, bantuan UNICEF dapat saja jabarkan pada tabel berikut,

Tabel 4.3 Estimasi Capaian Individu Bantuan UNICEF di RDK (2018 – 2021)

No.	Respon	2018	2019	2020	2021
1.	Nutrisi	1.140.000	322.097	1.012.622	303.647
2.	Kesehatan	979.784	287.830	655.591	515.300
3.	WASH	1.987.500	2.100.549	24.956	1.731.000
4.	Perlindungan Anak	100.000	24.000	10.506	152.051
5.	Pendidikan	623.750	542.251	359.000	408.968

Sumber: (UNICEF Situation Report 2018, 2019, 2020, & 2021)

#### 4.2.2 Organisasi Internasional Non-Pemerintah

INGOs (*International Non-Governmental Organizations*) atau Organisasi Internasional Non-Pemerintah, semakin memainkan peran penting dalam pergaulan global. Organisasi – organisasi ini merupakan entitas yang beroperasi secara independen terlepas dari pemerintah, dan sering kali berdedikasi untuk mengatasi berbagai masalah sosial, ekonomi, lingkungan dan kemanusiaan. Menyelesaikan permasalahan tambang skala kecil ilegal di RDK merupakan tantangan yang kompleks dan memiliki banyak aspek yang memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, dalam hal ini organisasi internasional non-pemerintah. Sesuai dengan pilar kedua R2P, INGOs merupakan bagian dari masyarakat internasional yang dapat mendukung serta mendorong negara dalam memenuhi tanggung jawab melindungi populasinya. Entitas ini sering kali bekerja sama dengan berkolaborasi dengan entitas lainnya. Beberapa dari INGO yang secara aktif beroperasi di RDK menangani kasus kemanusiaan di lingkungan pertambangan skala kecil adalah PACT.

PACT merupakan salah satu INGOs yang beroperasi di RDK. Secara historis, PACT sendiri sebenarnya telah beroperasi di RDK sejak tahun 2003. Organisasi ini menangani isu – isu pembangunan yang sebagian besar berfokus pada komunitas pertambangan skala kecil. Selama operasionalnya PACT telah mengagas beberapa program inti diantaranya :

1. Program *Children out of Mining*

*Children out of Mining* atau *The Watoto Injeya Mungoti* (WIM), merupakan program yang ditujukan untuk mengatasi faktor – faktor utama yang mendorong anak – anak untuk bekerja di tambang skala kecil, utamanya tambang mineral 3T (Timah, Tungsten, dan Tantalum) (PACT, 2016). Proyek ini dilakukan di daerah Manono, Katanga. Untuk mencapai tujuan tersebut, proyek ini berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak – hak anak serta meningkatkan stabilitas ekonomi pengasuh yang memiliki kesadaran yang sama. PACT bersama dengan mitra nya menggunakan berbagai pendekatan untuk berkomunikasi serta memperluas kerja sama dengan para pemangku kepentingan yang tidak hanya

mengadopsi norma yang diadvokasi melalui WIM namun juga menjadi pendukung mereka. Selama penerapannya program ini telah menjalankan 44 siaran radio tentang kesadaran pekerja anak, 34 pelatihan dan 31 gelaran peningkatan kesadaran, termasuk keterampilan mengasuh (*parenting*), forum pemuda, dan pertemuan komite lingkungan serta kunjungan komite pengawasan ke tambang (PACT, 2016). Sekitar 180 komite pengawasan sukarelawan mengunjungi lokasi – lokasi tambang dan mendidik anak – anak tentang bahaya pekerja anak (*worst form of child labor*). Lebih lanjut, dalam implementasinya cakupan program ini dapat dilihat pada tabel,

Tabel 4.4 Cakupan Pogram Childern out of Mining 2016

No.	Penerima	Anak - anak	Pelarangan Pekerja Anak	Presentase Penurunan Angka Pekerja Anak
1.	4.100	1.881	23 Tambang	89%

Sumber: (PACT, 2016)

## 2. Program *Mines to Market* (M2M)

*Mines to Market* (M2M) oleh PACT bertujuan untuk membantu masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam untuk beralih ke pemanfaatan sumber daya alam tersebut secara berkelanjutan (PACT, 2018). PACT mengadopsi strategi jangka panjang yang komprehensif dalam industri pertambangan, menghubungkan kegiatan pertambangan dengan aspek – aspek seperti mata pencaharian, tata kelola, kesehatan, lingkungan, dan penguatan institusi lokal, regional, dan nasional. M2M sendirinya tidak hanya beroperasi di RDK saja, tapi juga di 11 dari 40 negara mitra PACT. Pada tahun 2016 bekerja sama dengan Qualcomm PACT meluncurkan inisiatif kesehatan dan keselamatan untuk situs tambang iTSCi (*Tin Supply Chain Initiative*), serta program wawasan finansial dan tabungan untuk para penambang (PACT, 2018). Dengan program ini PACT dapat membantu memfasilitasi akses ke pasar untuk sumber daya mineral yang berkelanjutan. Hingga akhir tahun 2022, program ini telah memberikan manfaat langsung kepada 3.135 penambang (termasuk juga 274 perempuan) di 11 lokasi pertambangan, dan 300 anggota masyarakat di lima sektor pertambangan (TPV Cares, 2023).



Sejalan dengan dua program inti tersebut PACT juga melaksanakan berbagai proyek terkait tambang skala kecil ilegal di RDK. Proyek tersebut adalah, (1) *Responsible Sourcing Project*; (2) *Mutoshi ASM Pilot*; (3) *Addressing Child Labor in Cobalt and Small-Scale Mining in Kolwezi*; (4) *ASM Cobalt Formalization and Responsible Sourcing*; (5) *Formalization of Artisanal and Small-Scale Mining*; (6) *Sustainable Mine Site Validation*; dan (7) *International Tin Supply Chain Initiative*. Proyek – proyek ini juga turut mendukung serta membantu pemerintah dalam memonitor operasional tambang skala kecil, serta memberikan pelatihan, dan mempromosikan penambangan berkelanjutan.

#### **4.2.3 Organisasi Pemerintah Internasional**

USAID (*United States Agency for International Development*) merupakan organisasi independen dalam pemerintahan Amerika Serikat (A.S.), yang memiliki tugas utama mengawasi bantuan luar negeri serta memberikan bantuan pembangunan. USAID sering kali terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan, termasuk program kesehatan, pendidikan, ekonomi, bantuan kemanusiaan dan lingkungan. Selama operasionalnya USAID juga bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta untuk memanfaatkan sumber daya serta keahlian. USAID memainkan peranan penting di dalam menyukseskan kepentingan A.S. Operasionalnya dipandu oleh komitmen terhadap nilai – nilai kemanusiaan dan keyakinan akan pentingnya pembangunan global bagi kesejahteraan nasional dan internasional.

USAID di RDK merupakan salah satu organisasi pemerintah yang aktif memberikan dukungan program terkait permasalahan tambang skala kecil ilegal melalui pendanaan program – program dengan mitranya. USAID telah mendukung upaya untuk mengatasi permasalahan terkait konflik mineral dan mendorong pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab di RDK. Beberapa program tersebut diantaranya adalah:

### 1. USAID *Funded Commercially Viable Conflict-Free Gold Project*

Program CVCFG (*The Commercially Viable Conflict-Free Gold Project*) merupakan program pembangunan yang didukung oleh USAID di RDK. Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan rantai pasokan logam emas dari pertambangan skala kecil yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dari wilayah timur RDK bebas dari kekhawatiran terkait konflik (USAID, 2018). Hal tersebut dilakukan dengan pendanaan sebesar \$11.9 juta dollar. Program ini diharapkan akan mampu mendorong pelaku pertambangan skala kecil ilegal di RDK untuk beralih ke ekosistem pertambangan yang berkelanjutan dan tidak menyalahi hak asasi manusia. Program ini dilaksanakan dengan kerja sama oleh *Levin Source, Better Chain and RCS Global Upstream Ltd.*

Masyarakat internasional bersama dengan ahli terpilih dari sektor pertambangan skala kecil di RDK, dapat memberikan panduan strategis secara keseluruhan dan menggunakan teknologi paten untuk meningkatkan tata kelola dan monitor operasi industri tambang emas skala kecil yang diformalisasi. Area operasional program ini mencakup Haut-Uele, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, dan Maniema. Adapun tiga tujuan utama program ini, yakni:

- a. Meningkatkan permintaan dan investasi bersama pada emas ASM yang bebas dari konflik dan dari pengolahan yang bertanggung jawab dari kawasan timur RDK;
- b. Meningkatkan ekspor logam emas dari tambang skala kecil yang bertanggung jawab dan bebas konflik dari timur RDK; dan
- c. Meningkatkan kelayakan komersial dari kerjasama sumber daya logam emas di RDK (USAID, 2018).

Berdasarkan laporan terakhir yang dipublikasikan oleh USAID mengenai program CVCFG tahun 2022 terakhir telah dilakukan berbagai program untuk mendukung kelayakan tambang – tambang skala kecil di RDK beroperasi bebas dari konflik dan pelanggaran hak asasi. Rincian dari aktivitas yang dilakukan oleh USAID dapat dijabarkan sebagai berikut,

Tabel 4.5 Aktivitas Program CVCFG USAID

No.	Tahun	Proyek
1.	2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berinvestasi dalam solusi sistemik terhadap tantangan terkait pertambangan bertanggung jawab yang berdampak pada sektor ASM di Kongo</li> <li>Memindahkan 20 pelaku transaksi tambang skala kecil (dari sekitar 50) ke saluran penjualan</li> <li>Memanfaatkan investasi pra-ekspor lebih dari US\$ 2.512.266,74 yang didukung proyek</li> <li>Mengidentifikasi dan menerima <i>Allied Global Export</i> sebagai eksportir baru (berlisensi dan terdaftar di Kongo), dan dua calon eksportir (<i>Elpis Mining Company</i> dan <i>Hear Congo</i>) melalui prosedur <i>due diligence</i></li> <li>Meluncurkan secara publik kemitraan kami dengan bank Equity BCDC untuk memfasilitasi akses pendanaan hingga \$5 juta untuk proyek</li> </ul>
2.	2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kunjungan lapangan oleh USAID dan pemangku kepentingan utama lainnya ke Luhihi pada bulan Oktober 2021</li> <li>Publikasi "<i>The Blue Site Validation Policy</i>", yang memungkinkan eksportir yang didukung proyek untuk menunjukkan uji tuntas yang memadai pada situs yang belum divalidasi, atau yang status validasinya telah kedaluwarsa</li> </ul>

Sumber: (USAID, 2022)

## 2. USAID Sustainable Mine Site Validation Project

*Sustainable Mine Site Validation Project* merupakan program yang secara aktif berupaya memerangi praktik – praktik yang melanggar hukum seperti pekerja anak, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang terjadi di lokasi pertambangan skala kecil di RDK. Program ini digagas pada tahun 2018 dan diproyeksikan akan berlangsung selama 4 tahun hingga tahun 2022 dengan dana \$3.7 juta dollar (USAID, 2019). Dalam program ini, digunakan pendekatan baru terkait *Mine Site Qualification and Validation (Q&V)* di wilayah Utara dan Selatan

Kivu, RDK. Proyek ini akan memberikan kapasitas penuh terhadap pengawas dan multi-stakeholder lokal dalam melakukan Q&V. Nantinya mereka akan memantau aktivitas pertambangan di semua lokasi dan memitigasi risiko yang teridentifikasi di lokasi tersebut.

USAID juga bekerja sama dengan INGOs PACT. Organisasi ini ditugaskan untuk mengatasi tantangan keberlanjutan pada sektor finansial melalui dua strategi utama. Pertama, PACT akan memfasilitasi diskusi terkait regulasi di tingkat nasional dan daerah, dengan tujuan memberikan insentif bagi perencanaan yang tepat terkait distribusi dana yang adil demi mendukung *Community Learning Sites* (CLS) dan programnya. Kedua, PACT akan mendorong keterlibatan yang lebih besar dari sektor swasta melalui kerja sama dalam upaya ini. Lebih lanjut beberapa aktivitas – aktivitas yang telah dilakukan khususnya selama periode tahun 2018 – 2019 berdasarkan laporan yang dirilis USAID dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 4.6 Aktivitas Program Sustainable Mine Site Validation (2018 – 2019)

No.	Tahun	Proyek
1.	2018 - 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peluncuran resmi proyek di Kinshasa</li> <li>• Pelatihan 4 komite lokal mengenai aspek hukum terkait <i>qualification and validation</i> (Q&amp;V)</li> <li>• Pelatihan 141 anggota <i>community learning sites</i> (CLS) di Shabunda Center, Mugembe, Matili, dan Mapimo</li> <li>• Pelatihan 14 agen SAEMAPE dan DIVIMINES mengenai kerangka hukum</li> <li>• Sekitar 112 orang telah peka terhadap mekanisme pelaporan pelanggaran dan resiko pertambangan</li> <li>• Dibuat 15 materi terkait peningkatan kesadaran mengenai pekerja anak, yang ditampilkan di area pertambangan</li> <li>• 7 asosiasi perempuan dilatih dalam pendirian koperasi</li> <li>• 70 perempuan pekerja tambang dilatih mengenai isu gender, SGBV dan pendirian asosiasi</li> </ul>

Sumber: (USAID, 2019)

## BAB V

## PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa praktik pertambangan skala kecil ilegal di RDK merupakan permasalahan kompleks dengan tantangan multifaset yang terkait dengan kemiskinan, konflik, kekayaan sumber daya, degradasi lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Ketidakberhasilan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini dengan baik menyisakan getah pahit bagi masyarakat yang menderita akibat dampak keamanan dari tambang skala kecil ilegal. Kurangnya kontrol pemerintah, korupsi, dependensi ekonomi, hingga keterlibatan kelompok militer masih yang mempengaruhi ketidakberhasilan pemerintah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi negara.

Dapat ditemukan bahwa terdapat ketidakamanan yang mengancam nyawa serta penderitaan terhadap masyarakat pada kategori *health security*, *environmental security*, dan *personal security*. Pada kategori *health security* adanya praktik tambang skala kecil ilegal di RDK menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit dibuktikan dengan banyaknya pekerja yang mengalami stres dan kelelahan akut, terjangkit penyakit endemi seperti diare, malaria, TBC hingga HIV, serta paparan bebas bahan kimia berbahaya. Selanjutnya dalam kategori *environmental security*, ditemukan bahwa praktik tambang skala kecil ilegal membawa dampak deforestasi dan polusi yang besar. Hal ini mengancam langsung ekosistem RDK yang menjadikannya rentan terhadap bencana alam. Kemudian, pada kategori *personal security*, ditemukan bahwa terdapat praktik *modern slavery* (perbudakan modern) yang melibatkan kekerasan dan eksploitasi perempuan dan anak.

Melihat kondisi tersebut, masyarakat internasional yang terdiri dari PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa), INGO's (*Internasional Non-Government Organization*), dan IGO (*International Government Organization*) tidak tinggal diam. Bantuan serta dukungan terhadap negara dari organisasi internasional PACT,

USAID, dan PBB melalui UNDP, UNEP, dan UNICEF menunjukkan sikap pro-aktif dengan terlibat dalam upaya mengatasi permasalahan *human security* dari praktik tambang skala kecil ilegal. Berdasarkan konsep *human security*, masyarakat internasional menganut lima pendekatan utamanya *people-centred* dan *comprehensive* terhadap ancaman *human security*. Pendekatan ini melibatkan kemitraan banyak pemangku kepentingan, melokalisasi agenda internasional dan nasional, serta membantu upaya pencegahan dan ketahanan. Pada kasus RDK, masyarakat internasional mengacu pada pendekatan *comprehensive* telah melakukan upaya kolaborasi untuk mengatasi atau mendukung menyediakan keamanan dalam aspek *freedom from fear, want, dan to live in dignity*. Program pendidikan dan kesehatan yang dilakukan oleh UNICEF dan PACT dapat membantu masyarakat terdampak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sementara program perlindungan dan pengawasan yang digadang oleh UNDP, UNEP, UNICEF, PACT, dan USAID juga membantu memberikan perasaan aman dari ancaman kekerasan fisik maupun mental, juga anak – anak dari ancaman pekerja anak. Terakhir, serangkaian program pelatihan dan kesadaran masyarakat membantu masyarakat berfokus pada pemberdayaan individu dan komunitas menyokong “*freedom to live in dignity*”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adebayo, B. (3 Oktober 2019). At least 22 killed in Congo gold mine collapse, authorities say. Diakses pada 4 September 2023 <https://edition.cnn.com/2019/10/03/africa/congo-illegal-gold-mine-collapse-intl/index.html>
- Aggrey, J. J., Derkyi, M., Ros-Tonen, M. A. F., & Somuah, D. P. (2021). Human Insecurities in Gold Mining: A Systematic Review of Evidence from Ghana. *The Extractive Industries and Society*, 8(4). <https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.100951>
- Al Jazeera. (12 September 2020). At least 50 feared dead in DR Congo mine collapse. <https://www.aljazeera.com/news/2020/9/12/at-least-50-feared-dead-in-dr-congo-mine-collapse>
- Amnesty International. (19 Januari 2016). Democratic Republic of Congo: "This is what we die for": Human Rights Abuses in the Democratic Republic of the Congo Power the Global Trade in Cobalt. Diakses pada 24 Mei 2023 dari <https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/3183/2016/en/>
- Amnesty International. (19 Juni 2013). Chinese Mining Industry Contributes to Abuses in Democratic Republic of the Congo. Diakses pada 20 Mei 2023 dari <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/06/chinese-mining-industry-contributes-abuses-democratic-republic-congo/>
- Brier, D. G., Geray, M., Jaillon, A., dan Jorns, A. (2020). How much does a miner earn? Assessment of miner's revenue; basic needs study in DRC. *Assessment of Miner's Revenue & Basic Needs Study*.
- Brusselen, D. V. dkk. (2020). Metal Mining and Birth Defects: A Case-Control Study in Lubumbashi, Democratic Republic of the Congo. *The Lancet Planetary Health*, 4(4). [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(20\)30059-0](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30059-0)
- Bushenyula, P. K., Coppieters, Y., dan Irengé, C. A. (2023). Participative epidemiology and prevention pathway of health risk associated with artisanal mines in Luhiri area, DR Congo. *BMC Public Health*, 23.
- Butler, R. A. (1 Agustus 2020). The Congo Rainforest. <https://rainforests.mongabay.com/congo/>
- Butler, R. A. (22 Juli 2013). Deforestation Rate Falls in Congo Basin Countries. Diakses pada 26 Mei 2023 dari <https://news.mongabay.com/2013/07/deforestation-rate-falls-in-congo-basin-countries/>
- Children's National. (n.d.). Global Health. <https://www.childrensnational.org/research/center-for-genetic->





- Kabengele, B. O., Kayembe, P. K., Kayembe, J. M., Kashongue, Z. M., Kaba, D. M., & Akilimali, P. Z. (2019). Factors associated with uncontrolled asthma in adult asthmatics in Kinshasa, Democratic Republic of Congo. *PLOS ONE*.
- Kayembe, B. (14 September 2022). Student Field Post: Health in Artisanal Miners Communities: The Harsh Realities of Cobalt Mining in the Democratic Republic of the Congo. Harvard T.H. Chan. Diakses pada 24 Mei 2023 dari <https://www.hsph.harvard.edu/public-health-practice-resources/2022/09/14/student-field-post-health-in-artisanal-miners-communities-the-harsh-realities-of-cobalt-mining-in-the-democratic-republic-of-the-congo/>
- Kayembe, B. (14 September 2022). Student Field Post: Health in Artisanal Miners Communities: The Harsh Realities of Cobalt Mining in the Democratic Republic of the Congo. Harvard T.H. Chan. Diakses pada 24 Mei 2023 dari <https://www.hsph.harvard.edu/public-health-practice-resources/2022/09/14/student-field-post-health-in-artisanal-miners-communities-the-harsh-realities-of-cobalt-mining-in-the-democratic-republic-of-the-congo/>
- Koning, R. D. (2011). Conflict Minerals in The Democratic Republic of The Congo. *SIPRI*. <https://www.sipri.org/sites/default/files/files/PP/SIPRI27.pdf>
- Mbaka, G. O., & Vieira, R. (2022). The burden of diarrhoeal diseases in the Democratic Republic of Congo: a time-series analysis of the global burden of disease study estimates (1990–2019). *BMC Public Health*, 22. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13385-5>
- Melville, James. (19 Juni 2020). *From Stone to Phone: Modern Day Cobalt Slavery in Congo*. Byline Times. Diakses pada 27 Februari 2023 dari <https://bylinetimes.com/2020/06/19/from-stone-to-phone-modern-day-cobalt-slavery-in-congo/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (ed.ke-3). SAGE Publication. <https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>
- Muimba-Kankolongo, A., Banza Lubaba Nkulu, C., Mwitwa, J., Kampemba, F. M., & Mulele Nabuyanda, M. (2022). Impacts of Trace Metals Pollution of Water, Food Crops, and Ambient Air on Population Health in Zambia and the DR Congo. *Journal of environmental and public health*, 2022, 4515115. <https://doi.org/10.1155/2022/4515115>

- Nabila, N. (2020). Penyebab Ketidapatuhan Kongo Terhadap Konvensi Internasional Perlindungan Anak Di Pertambangan Kobalt. Universitas Airlangga.
- Nkuba, B. (2019). Invisible and Ignored? Local Perspectives on Mercury in Congolese Gold Mining. *Journal of Cleaner Production*. 795 – 804.
- Nordas, R., Rustad, S. A., & Qstby, G. (2016). Artisanal mining, conflict, and sexual violence in Eastern DRC. *The Extractive Industries and Society*, 3(2). 475-484. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2016.01.010>
- PACT. (2016). Children out of Mining. Diakses pada 9 September 2023 dari <https://www.pactworld.org/library/children-out-mining>
- PACT. (2018). Mines to Minerals. Diakses pada 9 September 2023 dari <https://www.pactworld.org/Mines%20to%20Markets>
- Pein, R. (2022). *The 'formalisation dilemma' of artisanal and small-scale mining: an analysis with reference to the Democratic Republic of the Congo*. [tesis, University of Cape Town]. OpenUCT. <https://open.uct.ac.za/handle/11427/36529>
- Relief Web. (2015). *Child labour in the DRC: Key Figures*. Diakses pada 21 Juli 2023 dari <https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/child-labour-drc-key-figures>
- Siri Aas Rustad, G. Ø. (2016). Does Artisanal Mining Increase the Risk of Sexual Violence?. *Quality in Primary Care* (2016) 24 (2).
- Sukandarrumidi. (2016). *Bahan Galian Industri*. (ed.ke-4). Gadjah Mada University Press.
- TPV Cares. (2023). Pact. Diakses pada 20 November 2023 dari <https://www.tpvcares.com/pact/>
- Transparency International. (2022). Country Data: Democratic Republic of the Congo. Diakses pada 9 September 2023 dari <https://www.transparency.org/en/countries/democratic-republic-of-the-congo>
- U.S International Trade Administration. (2022). *Democratic Republic of the Congo - Country Commercial Guide: Mining and Minerals*. International Trade Administration. Diakses pada 27 Februari 2023 dari <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/democratic-republic-congo-mining-and-minerals>
- UNDP. (1994). *Human Development Report 1994*. Oxford University Press. <https://digitallibrary.un.org/record/240220>
- UNDP. (2019). Draft Country Programme Document for the Democratic Republic of the Congo (2020–2024). Diakses pada 9 September 2023 dari

[https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-10/undp-cd-\\_cpd\\_2020-2024\\_revised\\_version\\_for\\_pre\\_hq\\_pac.pdf](https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-10/undp-cd-_cpd_2020-2024_revised_version_for_pre_hq_pac.pdf)

- UNEP. (2017). UNEP Study Confirms DR Congo's Potential as Environmental Powerhouse but Warns of Critical Threats. Diakses pada 28 Mei 2023 dari <https://www.unep.org/fr/node/848>
- UNEP. (2019). Global Mercury Assessment 2018. Diakses pada 9 September 2023 dari <https://www.unep.org/resources/publication/global-mercury-assessment-2018>
- UNEP. (2022). Congo Miners Step Towards Sustainable Gold Production. Diakses pada 9 September 2023. <https://www.unep.org/gef/index.php/news-and-stories/press-release/congo-miners-step-towards-sustainable-gold-production>
- UNEP. (2023). Democratic Republic of Congo: Strengthening DRC's National capacity to implement the Basel, Rotterdam, Stockholm and Minamata Conventions including SAICM. Diakses pada 20 November 2023 dari <https://www.unep.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/special-programme/special-programme-projects-database-47>
- UNEP. (2023a). DRC Paving Pathway to Sound Chemicals and Waste Management. Diakses pada 20 November 2023 dari <https://www.unep.org/technical-highlight/drc-paving-pathway-sound-chemicals-and-waste-management>
- UNICEF. (2018). DRC Humanitarian Situation Report December 2018. Diakses pada 20 November 2023 dari <https://www.unicef.org/documents/drc-humanitarian-situation-report-december-2018>
- UNICEF. (2019). DRC Humanitarian Situation Report December 2019. Diakses pada 20 November 2023 dari <https://www.unicef.org/documents/drc-humanitarian-situation-report-december-2019>
- UNICEF. (2020). Groundbreaking Multi-stakeholder Initiative to Address Child Labour In DRC Mining Communities. Diakses pada 9 September 2023 dari <https://www.unicef.org/drcongo/en/press-releases/multi-stakeholder-initiative-address-child-labour-mining-communities>
- UNICEF. (2020). DRC Humanitarian Situation Report December 2020. Diakses pada 20 November 2023 dari <https://www.unicef.org/documents/drc-humanitarian-situation-report-december-2020>
- UNICEF. (2021). DRC Annual Humanitarian Situation Report December 2021. Diakses pada 20 November 2023. <https://www.unicef.org/documents/drc-annual-humanitarian-situation-report-31-december-2021>
- Unreported World. (31 Oktober 2021). *Toxic Cost of Going Green*. [video]. <https://www.youtube.com/watch?v=ipOeH7GW0M8&t=993s>

- UNTFHS. (2016). *Human Security Handbook*. United Nations Online. Diakses pada 21 April 2022. <https://www.un.org/humansecurity/wp-content/uploads/2017/10/h2.pdf>
- USAID. (2014). Assessment of Human Trafficking in Artisanal Mining Towns in Eastern Democratic Republic of Congo. Diakses pada 13 Oktober 2023 dari [https://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/PA00K5R1.pdf](https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00K5R1.pdf)
- USAID. (2018). USAID-funded Commercially Viable, Conflict-Free Gold Program (CVCFG). Diakses pada 9 September 2023 dari [https://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/PA00X4C9.pdf](https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00X4C9.pdf)
- USAID. (2019). USAID Sustainable Mine Site Validation Project. Diakses pada 9 September 2023 dari [https://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/PA00WFDH.pdf](https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WFDH.pdf)
- USAID. (2019). USAID-PACT Sustainable Mine Site Validation Project: Annual Report – FY19. Diakses pada 23 November 2023 dari [https://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/PA00WGW4.pdf](https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WGW4.pdf)
- USAID. (2022). USAID'S Zahabu Safi (Clean Gold) Project: Q4 and Annual Report FY2022. Diakses pada 23 November 2023 dari [https://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/PA00ZQ97.pdf](https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00ZQ97.pdf)
- Wikara, C. (2022). Modern Slavery.